

**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERDASARKAN PASAL 18 AYAT
(1) PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

(STUDI DI KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Safira Riansyah

NIM 175010107111092



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI DI KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA)

Identitas Penulis

a. Nama : Safira Riansyah
b. Nim : 175010107111092

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 5 Bulan

Pembimbing Utama



Luthfi Effendi, S.H., M.Hum
NIP. 196008101986011002

Pembimbing Pendamping



Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H
NIP. 197703052009122001

Mengetahui,
Ketua Departemen

Hukum Administrasi Negara



Luthfi Effendi, S.H., M.Hum
NIP. 196008101986011002

HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1)

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

(STUDI DI KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA)

Oleh :

Safira Riansyah

175010107111092

Sketsa ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 30 November 2020

Pembimbing Utama



Luthfi Effendi, S.H., M.Hum

NIP. 195907171986011000

Pembimbing Pendamping



Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H

NIP. 2016078704272001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Sukarmi S.H., M.H

NIP. 1967705031991032002

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat, taufik serta hidayah-Nya yang sangat besar sehingga penulis pada akhirnya bisa menyelesaikan Skripsi dengan judul: Penegakan Sanksi Administratif Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Kawasan Malioboro Yogyakarta). Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga pada umatnya sampai akhir zaman.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. M. Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Departemen Hukum Administarsi Negara dan selaku Dosen Pembimbing Utama atas kebaikan dalam meluangkan waktu, pikiran tenaga, serta motivasi untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
3. Ibu Shinta Hadiyantina, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas kebaikan dalam meluangkan waktu, pikiran tenaga, serta motivasi untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang telah menerima dan memberikan jawaban atas wawancara sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.
5. Bapak dan Ibu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta yang telah menerima dan memberikan jawaban atas wawancara sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.
6. (Alm) Bapak Darmansyah dan Ibunda tercinta Rindah Susiana yang menjadi nafas perjuangan untuk penulis. Terima kasih atas doa - doa yang tidak ada hentinya dan bantuan, dukungan, kasih sayang serta dukungan moral dan material yang telah diberikan untuk penulis selama ini. Engkaulah ibu dan ayah yang sangat luar biasa sejagat raya yang terus mendampingi penulis saat suka maupun duka.

7. Ayu Riansyah dan Nanda Riansyah selaku saudara kandung penulis yang telah menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan keluarga, berkat diri mereka pula sehingga penulis terus semangat melanjutkan pendidikan.
8. Sahabatku Porenjes Pink, Zaimah, Nisa, Avi, Arifa, Rahma, Acha, yang selalu memberikan candu positif terhadap penulis untuk selalu kuat, sabar, dan ikhlas dalam kehidupan.
9. Sahabat BarBar penulis di kampus tercinta, Noviana L N, Fani S, Elizabeth, Hana S, Alodia Salsabila, Ulfa Shella, Desmanita, yang telah membantu banyak sekali sekalipun tempat suka dan duka saat penulis di Kota Malang.
10. Dan terima kasih untuk Dewa Ayu, Putri Bestari, Kak Sisil, Kak Tika, Indhi, Nica, Kiki, Iin, Dina, yang telah menjadi penerang kegelapan penulis.

Serta sahabat dan teman-teman Penulis tanpa terkecuali, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini. Serta semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak sempat penulis sebutkan, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penuliis berharap semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan para pembaca. Tidak terlepas dari itu, Penulis memahami bahwa makalah skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik lagi.

Malang, 11 Juni 2021



Safira Riansyah

NIM: 175010107111092

DAFTAR ISI	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
BAB 1 PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Orisinalitas Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Alasan Pemilihan Lokasi	12
4. Jenis Data dan Sumber Data	12
5. Teknik Memperoleh Data	13
6. Populasi, Sample, dan Teknik Sampling	14
7. Teknik Data Analisis	15
8. Definisi Operasional	16
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	17
B. Tinjauan Tentang Sanksi Administratif	20
C. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah	25
D. Tinjauan Tentang Rokok	29
E. Tinjauan Tentang Kawasan Tanpa Rokok	35

F. Tinjauan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	38
G. Tinjauan Teori Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	39
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta	40
1. Profil Kota Yogyakarta	40
2. Visi dan Misi Yogyakarta	40
3. Keadaan Geografis Kota Yogyakarta	41
B. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	43
C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta	45
D. Penegakan Hukum Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Pasal 18 Ayat (1) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	49
E. Hambatan dan solusi dalam Penegakan Sanksi Administratif Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kawasan Malioboro)	58
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	70

PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERDASARKAN PASAL 18 AYAT**(1) PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017****TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK****(STUDI DI KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA)**

Safira Riansyah, Luthfi Effendi, S.H., M.Hum,

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: safirariansyah@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat tentang permasalahan penegakan sanksi administratif berdasarkan peraturan daerah kota yogyakarta pasal 18 ayat (1) nomor 2 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok (Studi di Kawasan Malioboro Yogyakarta). Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, sebagai bentuk menjaga kebersihan lingkungan agar bebas dari bahaya asap rokok. Di Kawasan Tanpa Rokok telah dipasang tanda larangan untuk tidak merokok dan telah disediakan ruang khusus merokok, masih mudah ditemukan perokok yang merokok sembarangan hal ini menjadi kontroversi. Berdasarkan hal yang disebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Penegakan Hukum Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Pasal 18 Ayat (1) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kawasan Malioboro)? (2) Apa hambatan dalam Penegakan Hukum Sanksi Administratif Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kawasan Malioboro)? dan bagaimana cara mengatasinya? Dari 5 faktor parameter penegakan hukum, hanya faktor fasilitas kawasan tanpa rokok yang berhasil, sedangkan faktor hukum, penegak hukum, masyarakat dan kebudayaan belum maksimal dalam penegakan hukum kawasan tanpa rokok di Kota Yogyakarta. Hambatan yang timbul seperti hukum yang belum jelas, kuantitas dan kinerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam pembinaan dan pengawasan kurang sehingga ada ketidakpuasan dari masyarakat terkait kinerja pengawasan dan penegakan hukum dari Satpol PP Kota Yogyakarta.

Kata Kunci : Kawasan Tanpa Rokok, Yogyakarta, Administratif.

Enforcement of Administrative Measure as a Sanction according to Article 18 Paragraph (1) of Local Regulation of Yogyakarta Number 2 of 2017 concerning No-Smoking Zones

(A study in Malioboro Street of Yogyakarta)

Safira Riansyah, Luthfi Effendi, S.H., M.Hum,

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.

Faculty of Law Universitas Brawijaya

Email: safirariansyah@student.ub.ac.id

ABSTRACT

This research aims to study the enforcement of an administrative measure taken as a sanction according to Local Regulation of Yogyakarta Article 18 Paragraph (1) Number 2 of 2017 concerning No-smoking Zones, involving a study conducted in Malioboro Street of Yogyakarta. To keep the area clean, non-smoking signs are easily found in the area, and smoking chambers are made available, but it does not seem to stop people from smoking in the area. Departing from this issue, this research is intended to investigate (1) how is the administrative sanction enforced following Local Regulation of Yogyakarta Article 18 Paragraph (1) Number 2 of 2017 concerning No-smoking Zones? (2) what are the impeding factors in the enforcement of the administrative sanction of the Article and how are those factors resolved? The facility provided to support no-smoking zones is the only factor that works among some other factors like law, law enforcers, the members of society, and culture. Moreover, another impeding factor may come from the lack of the performance of health authorities and civil service police unit in Yogyakarta in terms of the supervision and coaching given, and this weakness leads to dissatisfaction of the people.

Keywords: no-smoking zones, Yogyakarta, administrative

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Safira Riansyah

NIM : 175010107111092

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang,

Yang menyatakan,



Safira Riansyah

NIM: 175010107111092

BAB 1 PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia termasuk Negara kepulauan yang anggun apabila dilihat secara langsung maupun tidak langsung dan banyak akan sumber daya alamnya yang tersimpan. Letak yang berhubungan dengan kebudayaan atau kebiasaan, politik, sosial, dan ekonomi serta kaya akan sumber daya alam, jenis tanaman, dan jenis hewan. Dari berbagai macam hal yang paling berkembang dan menguntungkan adalah aspek pariwisata. Indonesia terdiri dari kekayaan sumber daya yang berupa sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dan sumber daya buatan. Indonesia mempunyai kawasan yang dilindungi atau budidaya Sumber Daya Alam (Selanjutnya dapat disebut sebagai SDA) yang memiliki pengaruh besar terhadap kelanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam suatu wilayah negara tertentu untuk dijaga dengan baik akan menimbulkan dampak berpositif bagi kehidupan sekitarnya. Manusia mempunyai hubungan timbal-balik dengan kawasannya, karena pekerjaan dari manusia itu sendiri akan mempengaruhi kawasan di sekitarnya. Hubungan saling timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok atau masyarakat dan kawasan alam yang dimilikinya.¹

Di samping keindahan alam dan corak budayanya, Indonesia terkenal di mata dunia dengan sopan santun dalam bermasyarakat. Sikap seperti ini membuat negara Indonesia menjadi negara yang apabila dikunjungi maka turis mengunjungi Kembali dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi negara tujuan utama wisata dunia. Tujuan pariwisata seperti Kuta (yang terletak di Bali), Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Malioboro di Yogyakarta, Pantai Senggigi di Nusa Tenggara Barat, Bunaken di Sulawesi Utara, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Scaled down Indonesia Indah, Pantai Pangandaran, Tangkuban Perahu, Pulau Komodo serta Sumatera Barat. Daerah tersebut merupakan daerah pariwisata Kebanggaan Indonesia untuk lebih maju di mata dunia. Bagi wisatawan mancanegara,

¹ Laurence A Manullang. **Geographis Indonesia**. Universitas Timbul Nusantara. Jakarta. 2020.

Indonesia mempunyai corak tersendiri yang membuat kesan luar biasa, tak dapat dipungkiri dan kembali lagi untuk berkunjung ataupun memilih destinasi lain yang belum pernah mereka datang, karena bermacam-macam pilihan destinasi wisata di Indonesia, baik itu wisata alam, wisata budaya, seni maupun kuliner yang tersedia.²

Kemudian, salah satu wilayah yang memiliki beragam wisata adalah Kota Yogyakarta. Dimana, Kota Yogyakarta merupakan kota pendidikan, kebudayaan dan salah satu wisata yang terkemuka memiliki potensi besar dalam rangka memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional. Secara geografis, Kota Yogyakarta juga diuntungkan oleh jarak antara lokasi objek kawasan wisata yang terjangkau, dan mudah ditempuh. Setiap tahun angka terus bertambah kedatangan turis dari luar daerah maupun mancanegara, sebagian besar menuju pusat kota yang terletak di KM 0, lebih tepatnya di Jalan Malioboro. Pemerintah Kota Yogyakarta memahami segala kepentingan para pendatang, untuk memberikan berbagai layanan, kebutuhan, dan informasi sehingga bagi para pendatang tidak mengalami berbagai masalah maupun, merasa terganggu, sebab para pendatang tersebut membutuhkan area yang aman, bersih, dan nyaman, apalagi masa pandemi seperti sekarang ini membutuhkan lingkungan yang kondusif dan preventif untuk mencegah penularan virus Covid-19.³

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Malioboro terutama pada musim liburan memang menimbulkan masalah pada polusi udara sebab tak sedikit dari wisatawan sering melanggar peraturan yang berada di kawasan tersebut. Selain polusi udara, masalah lain muncul yaitu tentang merokok. Tingginya intensitas dan volume polusi udara pada kawasan Malioboro membuat pemerintah harus menyediakan ruangan khusus merokok pada sudut kota. Namun hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan tempat khusus merokok di kawasan Malioboro dan masih banyaknya pedagang rokok yang masih diperbolehkan jualan di Jalan Malioboro.⁴

² Ibid. hlm 2

³ Wendyartaka, Anung. **Pendapat Masyarakat Kota Yogya tentang Pariwisata Daerah**. Kompas. Jakarta. 2015. hlm.2

⁴ Ibid. hlm.3

Pendatang dari berbagai daerah yang merokok terus meningkat namun untuk saat ini tempat merokok tidak tersedia, akibatnya banyak para pejalan kaki disekitar kawasan malioboro yang merokok di bahu jalan dan trotoar nantinya akan menyebabkan polusi udara maupun puntung rokok yang dibuang sembarangan.

Tidak sedikit bahwa nilai-nilai sosial pada masyarakat sering ditemukan pelanggaran terhadap aturan dan kaidah-kaidah lainnya, karena setiap manusia mempunyai tingkat pemahaman yang berbeda. Apabila hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan serta kepentingannya, maka dia akan mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada, serta mencari jalan keluar dan/atau pertimbangan-pertimbangan lainnya sebagai landasan konseptual yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.⁵

Dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani merinci empat titik yang dijadikan lokasi khusus merokok di kawasan Malioboro, yakni Taman Parkir Abu Bakar Ali, Malioboro Mall, Ramayana, dan Pasar Beringharjo.

Beliau menjelaskan bahwa penancangan Malioboro menjadi Kawasan Tanpa Rokok sebenarnya telah direncanakan sejak lama. Bahkan kegiatan launching sudah dihelat sekitar akhir Maret sebelum ada kasus positif corona di Kota Yogyakarta.

Kawasan tanpa rokok di Malioboro Kota Yogyakarta diberlakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan bersih dan sehat yang ada di Kota Yogyakarta. Permasalahan merokok di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta sangat mengganggu kepentingan umum dan menciptakan bahaya bagi orang dan sekeliling lingkungan yang semestinya kawasan tersebut menjadi kawasan tanpa rokok.

Merokok merupakan hak seseorang, tetapi merokok disembarang tempat dapat mengganggu kenyamanan orang lain, selain itu dampak asap dari batang rokok yang ditimbulkan juga sangat kurang baik. Dampak rokok juga dapat menjadikan seseorang atau individu mengalami penyakit otak, tulang,

⁵ Soetandyo Wignjosebroto, **Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya**, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 8.

mulut, tenggorokan, paru-paru, kanker, gangguan janin, dan kerusakan lainnya pada organ tubuh manusia.⁶

Kemudian, salah satu kawasan tanpa rokok adalah kawasan Malioboro Yogyakarta, artinya seluruh pengunjung wisatawan hingga pelaku wisata tidak bisa lagi merokok sembarangan di kawasan sekitar Malioboro. Wakil wali kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menuturkan realisasi KTR ini demi keamanan dan kenyamanan Malioboro sebagai objek wisata.⁷

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah suatu bentuk penegakan hukum terhadap ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.⁸

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok resmi diberlakukan di Kota Yogyakarta sebagai salah satu urusan konkuren Pemda Kota Yogyakarta, setelah ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2017 oleh Sulistiyo sebagai Pj. Walikota Yogyakarta.

Permasalahan merokok sampai saat ini masih menjadi masalah nasional yang perlu secara berlanjut diupayakan penanggulangannya, karena menyangkut berbagai faktor permasalahan dalam kehidupan, yaitu faktor ekonomi, sosial, politik, utamanya faktor kesehatan. Fakta bahwa resiko dari merokok yaitu masalah tembakau pada kesehatan sangat besar, jauh lebih dari yang sudah banyak disadari oleh sebagian besar masyarakat. Kebiasaan merokok berhubungan dengan kejadian berbagai macam penyakit, sebagian besar berakhir pada kematian.

⁶ Kevin Adrian. **Segudang Bahaya Merokok bagi Kesehatan Tubuh**. 2021. Diambil dari <https://www.alodokter.com/segudang-bahaya-merokok-terhadap-tubuh>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2021.

⁷ Azka Ramadhan. **Malioboro Resmi Jadi Kawasan Tanpa Rokok, Warga hingga Wisatawan Dilarang Merokok Sembarangan**. 2020. Diambil dari <https://jogja.tribunnews.com/2020/11/12/malioboro-resmi-jadi-kawasan-tanpa-rokok-warga-hingga-wisatawan-dilarang-merokok-sembarangan?page=3>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2021.

⁸ **Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Merokok**, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

Salah satu usaha pemerintah daerah dalam menjalankan amanatnya tertuang di dalam Pasal 167 UUNRI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menegaskan bahwa pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat melalui pengelolaan administratif kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dengan ini sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang asas desentralisasi maksud dari tujuannya membuat wewenang untuk mengatur dan mengawasi Kawasan Tanpa Rokok, pembagian kekuasaan, pendelegasian kewenangan dan pembagian daerah dalam bentuk pemerintahan dalam negara kesatuan sehingga dengan sendirinya akan menciptakan kewenangan pada pemerintahan daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Penegakan hukum dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan suatu tahapan untuk dilakukannya usaha tegaknya atau berfungsinya peraturan hukum secara fakta sebagai metode perilaku atau hubungan hukum dalam pemerintahan sampai masyarakat. Pemerintah melakukan penegakan hukum terkait pelanggar merokok ini sangat penting mengingat perlunya sanksi yang diberikan terhadap pelanggar bukan hanya sanksi teguran tetapi sanksi administratif juga perlu ditegakkan.

Dalam pasal 18 peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok, menjelaskan bahwa "pengelola atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif" berupa:⁹

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. dipublikasikan.

⁹ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Merokok, Bab III Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pasal 18.

Sehingga pada skripsi kali ini, penulis mengambil fokus penelitian pada Kawasan Malioboro di Kota Yogyakarta tentang Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok karena selama ini isu mengenai rokok merupakan isu yang telah lama menjadi perhatian banyak pihak. Setelah diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum sanksi administratif pasal 18 peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok terhadap larangan dan pengendalian terkait merokok sembarangan. Dengan adanya masalah-masalah dalam kasus, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Penegakan Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Pasal 18 Ayat (1) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kawasan Malioboro)"**.

B. Orisinalitas Penelitian

Adapun orisinalitas dalam penelitian skripsi kali ini. Orisinalitas Penelitian dapat dijelaskan pengertiannya sebagai suatu persamaan dan perbedaan terhadap bidang yang diteliti antara penelitian dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Berikut merupakan tabel orisinalitas dari penelitian ini:

Tabel 1.
Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Nadiyah Nurul Fikri Universitas Brawijaya	Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Proses Belajar Mengajar (Studi di	1. Bagaimana implementasi pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di

		Dinas Kesehatan Kota Malang) (2019).	tempat belajar mengajar? 2. Apa hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di tempat belajar mengajar? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di tempat belajar mengajar?
2	Agil Prianggara Universitas Brawijaya	Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Surabaya)	1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok?

		(2013).	2. Apakah hambatan-hambatan yang timbul dalam Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok dan Bagaimana cara mengatasinya?
3	I Nyoman Adi Pradana Universitas Brawijaya	Efektivitas Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung) (2017)	1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Badung? 2. Apa Hambatan Dalam Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Badung

			Dan Bagaimana Cara Mengatasinya?
--	--	--	----------------------------------

Sumber : data sekunder diolah penulis, 2021.

Berikut merupakan perbedaan dari orisinalitas penelitian terhadap penyusunan skripsi kali ini:

1. Variabel perbedaan yang terjadi pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu memberikan nilai penting terhadap orisinalitas penelitian, pada table diatas adalah penelitian terdahulu, perbedaan pada penelitian yang pertama yaitu Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Proses Belajar Mengajar (Studi Dinas Kesehatan Kota Malang). Dalam penelitian tersebut yang menjadi faktor pembeda yaitu menyebutkan bahwa Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan tentang bab Penetapan Kawasan Tanpa Rokok dalam penelitian tersebut studi kasus di Dinas Kesehatan Kota Malang yang dimana penelitian lebih menyeluruh dan khusus pengawasan di dalam Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Belajar Mengajar. Demikian pada penelitian ini lebih menyeluruh dan khusus Sanksi Administratif di Kawasan Tanpa Rokok.
2. Pada penelitian yang kedua, yaitu Pelaksanaan Pasal 7 Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Surabaya) sementara itu penelitian ini melakukan studi di Kawasan Malioboro Yogyakarta.
3. Kemudian penelitian yang ketiga, yaitu Efektivitas Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung) perbedaan terletak pada rumusan masalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mencoba mengidentifikasi Penegakan Sanksi Administratif Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di

Kawasan Malioboro), beberapa pertanyaan yang perlu dijawab pada pembahasan tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penegakan Hukum Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Pasal 18 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kawasan Malioboro) ?
- b. Apa hambatan dalam Penegakan Hukum Sanksi Administratif Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kawasan Malioboro) dan bagaimana cara mengatasinya ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun 2 (dua) tujuan dari penelitian skripsi kali ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi Penegakan Hukum Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Pasal 18 Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- b. Mengidentifikasi hambatan dalam Penegakan Hukum Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Pasal 18 Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan cara mengatasinya.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang nyata untuk pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada ilmu hukum administratif, yakni tentang Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Pasal 18 Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi saat penegakan hukum peraturan Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah guna memberikan tambahan pengalaman dan memperluas wawasan penanganan penegakan hukum dari Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Pasal 18 Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

b. Bagi Masyarakat

Pada penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi pemahaman kepada masyarakat terhadap Kawasan Tanpa Rokok, sebagai faktor pendukung keberhasilan penegakkan hukum di Malioboro Kota Yogyakarta.

c. Bagi Kalangan Akademisi

Dalam penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Kawasan Tanpa Rokok khususnya dalam penegakan hukum sanksi administratif pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017.

d. Bagi Peneliti

Melalui laporan, hasil dari proses penelitian ini merupakan sumbang pemikiran bagi dunia keilmuan, khusus dalam penegakan hukum Perda Kawasan Tanpa Rokok.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktek legislasi di Indonesia.¹⁰ Karena, permasalahan yang akan penulis analisis terkait dengan penegakan hukum sanksi administratif Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Pasal 18 Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

¹⁰ Noor M., **Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**, Jurnal *RechtVinding*. Vol.1, No.1. Tahun 2012., hlm 19.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian didalam skripsi ini penulis menggunakan Yuridis Sosiologis, yang dimaksud pada pendekatan ini mengidentifikasi hukum dan konsep hukum sebagai lembaga sosial yang fungsional dan riil pada kenyataan dilapangan.¹¹ Mengetahui upaya yang telah dilakukan dan solusi dalam hambatan-hambatan yang terjadi.

3. Alasan Pemilihan Lokasi

Pilihan lokasi dalam penelitian dipilih secara sengaja (Purposive) yaitu berdasarkan pertimbangan sesuai tujuan peneliti. Dikarenakan Kawasan Malioboro sudah memberlakukan peraturan Kawasan Tanpa Rokok tetapi kenyataannya masih banyak yang melanggar peraturan tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. Pilihan lokasi penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan yang diharapkan penulis mampu untuk mendapatkan data-data untuk penelitian ini. Salah satu menjadi alasan pertimbangan dalam penelitian ini adalah unsur keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik dilihat dari segi tenaga, dana maupun dari segi efisiensi waktu.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data yang telah didapatkan dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian langsung yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian empiris ke Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta.

2) Data Sekunder

¹¹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.51.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku / literatur atau Peraturan Perundang-undangan. Data sekunder pada penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3) Data Tersier

Sumber data pengetahuan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer hingga bahan hukum sekunder. Sumber data terdiri dari kamus atau situs internet.

b. Sumber Data

Dalam sumber primer dan sekunder termasuk juga perundang-undangan. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- 3) Termasuk dari buku-buku, jurnal, laporan penelitian, dan berita internet.

5. Teknik Memperoleh Data

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini peneliti mencari data dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, pendapat para ahli dan

penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Mengumpulkan data secara langsung dilapangan dengan menggunakan teknik Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi kepada:

- 1) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta.
- 3) Pedagang rokok.
- 4) Para pengunjung Kawasan Malioboro.

6. Populasi, Sample, dan Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan (objek) yang akan diteliti.¹² Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹³ Dalam hal ini populasi yang dipilih adalah Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Kota Yogyakarta, Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pedagang rokok, serta para pengunjung kawasan malioboro.

b. Sample

Sample adalah bagian jumlah dari populasi penelitian. Dalam penelitian ini sampel penelitian yang didapatkan berjumlah 64 orang yang terdiri dari 1 orang responden dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 1 orang responden dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta, dan sisanya 62 orang responden baik itu pedagang rokok dan para pengunjung di Kawasan Malioboro.

¹² Bambang P., **Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi**, Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2005, hlm 119

¹³ Sunggono B., **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 118

1. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Pengambilan sampel di Kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dipilih secara pertimbangan dan subjektif. Jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap populasi.

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Pengambilan sampel di Kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dipilih secara pertimbangan dan subjektif. Jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap populasi.

3. Pedagang Rokok

Pengambilan sampel di Kawasan Malioboro yang dipilih secara acak, jadi peneliti menentukan sendiri.

4. Para Pengunjung Kawasan Malioboro

Pengambilan sampel di Kawasan Malioboro yang dipilih secara acak, melalui tanya jawab responden dan membuat google form lalu menyebarkannya. Dimana dalam tanya jawab responden melihat respon dari para pengunjung di Kawasan Malioboro terkait Penegakan Sanksi Administratif Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Kawasan Malioboro Yogyakarta).

c. Teknik Sampling

Teknik Sampling adalah cara atau teknik pengambilan data sampel. Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini Simple Random Sampling, cara sederhana (simpl) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata sosial yang ada dalam populasi tersebut.

7. Teknik Data Analisis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan

sesuai dengan tujuan. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁴

Data dalam penelitian ini diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang sedang diteliti.

8. Definisi Operasional

a. Penegakan Sanksi Administratif

Penegakan Sanksi Administratif adalah penegakan hukum non yudisial, artinya penjatuhan sanksi dijatuhkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, jadi tidak melalui proses persidangan. Yang mana berupa :

- 1) Peringatan lisan;
- 2) Peringatan tertulis; dan/atau
- 3) Dipublikasikan.

b. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok adalah Kawasan yang dilarang untuk merokok.

c. Penegakan Hukum

Hukum adalah peraturan (larangan dan perintah) yang mengatur tata tertib masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat.¹⁵ Penegakan hukum adalah suatu usaha upaya mewujudkan tata tertib di dalam lingkungan masyarakat.

d. Peraturan Daerah

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005, hlm.38.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

Hukum adalah peraturan (larangan dan perintah) yang mengatur tata tertib masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat.¹⁶ Penegakan hukum adalah suatu usaha upaya mewujudkan tata tertib di dalam lingkungan masyarakat.

Dalam bahasa asing penegakan hukum terdapat beberapa istilah misal *recht toe passing hand having* (dalam Bahasa Belanda), *law enforcement*, *application* (dalam Bahasa Amerika) dengan definisi dari penegakan hukum itu ialah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹⁷ Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diinginkan masyarakat menjadi suatu kenyataan yang tercapai. Penegakan hukum merupakan suatu cara yang menyertakan berbagai banyak hal.¹⁸

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian dalam hukum dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum dalam masyarakat pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum bermasyarakat adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma hukum bermasyarakat secara nyata sebagai aturan pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.¹⁹

Penegakan hukum mempunyai beberapa tugas, misalnya untuk bentuk perlindungan kepada kepentingan manusia, supaya kepentingan manusia itu sendiri dapat lebih terlindungi maka hukum harus dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum dalam bermasyarakat dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi tidak dapat disanggah juga karena pelanggaran hukum.

Pada hal ini hukum yang sudah dilanggar wajib ditegakkan. Dengan

¹⁶ Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005, hlm.38.

¹⁷ Imron Rosyadi, **Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia**, Jurnal Media Hukum, Vol. 3 No. 2, 2007. hlm. 79.

¹⁸ Dellyana, Shant, **Konsep Penegakan Hukum**, Liberty, Yogyakarta. 1988. hlm.

32

¹⁹ *Ibid*. hlm.33

penegakkan hukum, bahwa hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum menjadi salah satu aspek terpenting dalam suatu negara, karena dengan penegakan hukum tujuan hukum, yakni keadilan hukum, kepastian hukum dan manfaat hukum dapat dirasakan oleh masyarakat.²⁰

Penegakan hukum dalam masyarakat diartikan pada pengendalian hukum oleh penanggung jawab penegakan hukum dan setiap individu yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yaitu suatu cara yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah begitupun sikap nyata stiap individu dengan yang lainnya. Kaidah tersebut selanjutnya menjadi suatu pedoman atau patokan bagi sikap atau tindakan yang dianggap layak atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk membentuk, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk menciptakan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan dalam kehidupan sosial dan keadilan menjadi suatu kenyataan. Tingkatan perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan dasar penegakan hukum didalam masyarakat. Hambatan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada yang tidak cocok didalam kaidah terhadap individu tersebut. Hambatan tersebut muncul apabila tidak cocok antara nilai-nilai yang saling berhubungan, yang beralih bentuk dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak tahu arah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²¹

Berbagai macam faktor yang saling berhubungan dengan keberhasilan dalam melakukan prosedur penegakan hukum. Pada umumnya, ada 5 (lima) faktor yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekamto, sebagai berikut:²²

²⁰ Gerry Putra Ginting, **Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan di Kabupaten Sleman**, Universitas Atma Jaya *E-Journal*, Yogyakarta. 2015. hlm.3.

²¹ Satiopto Rahardjo. **Masalah Penegakan Hukum**, Sinar Baru, Bandung, 1983. hlm. 15

²² Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, Rajawali Pers, Jakarta, 2006. hlm.307-308.

1. Faktor hukumnya sendiri

Dalam praktiknya penyelenggaraan hukum pada faktanya sering terjadi kontroversi antara kepastian hukum dan keadilan dalam bermasyarakat, hal ini terjadi oleh konsep keadilan membuat ringkasan, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu kebijakan yang telah ditentukan undang-undang. Oleh karena itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar undang-undang merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum lainnya.

Maka pada dasarnya penyelenggaraan hukum bukan hanya penegakan hukum saja namun juga dapat menjaga perdamaian, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan suatu proses penyesuaian antara norma dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai perdamaian.

2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jika tidak ada sarana atau fasilitas tertentu, bahwa tidak mungkin penegakan hukum dalam masyarakat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas saling berhubungan satu sama lain, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum mencapai tujuannya.

3. Faktor penegakan hukum

Berbagai pihak yang terlibat nantinya secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat.

4. Faktor kebudayaan

Lebih dari cukup persamaan antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah untuk menegakkannya. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sama atau bertentangan dengan kebudayaan

masyarakat, nantinya semakin sulit untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum dimaksud.

5. Faktor masyarakat

Nilai terpenting dari masyarakat yang menentukan sebagai bentuk penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Apabila tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat tinggi, maka semakin memungkinkan penegakan hukum menjadi lebih baik. Sebaliknya semakin rendah ukuran kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit untuk melaksanakan penegakan hukum di masyarakat yang baik.

B. Tinjauan Tentang Sanksi Administratif

1. Pengertian Sanksi Administratif

Menurut ahli Aristoteles, bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir sampai meninggal, manusia hidup saling tolong-menolong dan melakukan hubungan dengan manusia yang lainnya. Hubungan antara seseorang dengan orang lain mungkin secara langsung maupun tidak langsung. Kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan bantuan satu dengan yang lainnya. Kepentingan hidup satu manusia dengan manusia lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan.²³

Perbedaan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan persyaratan tata tertib yang dapat mengatur dan mengembangkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul menjadi perdamaian. Persyaratan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti tertib sosial.²⁴

Menurut teori Durkheim berusaha untuk berkaitan antara hukum dengan bentuk sosial. Hukum dipergunakan sebagai suatu alat diagnosis

²³ R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm. 40.

²⁴ *Ibid*, hlm. 41.

untuk menemukan syarat-syarat struktural bagi perkembangan masyarakat. Hukum dilihat sebagai variable saling terikat, yang tergantung pada bentuk sosial masyarakat. Hukum juga dilihat dari teori Durkheim sebagai suatu alat untuk mempertahankan kesatuan dalam masyarakat serta menentukan perbedaan masyarakat.²⁵

Berangkaian dengan hukum tidak jauh dari sanksi karena pelanggaran hukum yang telah terjadi, menurut Black's Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah sebuah hukuman ataupun tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.²⁶

Secara umum, sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administratif atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan perizinan, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administrasi, atau daya paksa polisional.

Dikutip oleh Philipus M. Hadjon, bahwa dalam instrumen penegakan hukum administratif meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan suatu langkah untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah untuk memaksakan kepatuhan.²⁷

Setiap pemerintahan memiliki tujuan masing-masing untuk dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya. Dalam mencapai tujuannya maka suatu pemerintahan membutuhkan adanya suatu perangkat yang memiliki kesesuaian fungsi dan wewenang masing-masing. Pemberian kewenangan terhadap struktur pemerintahan merupakan bagian dari ruang lingkup dari Hukum Tata Negara (HTN). Sedangkan dalam pembatasan struktur tersebut merupakan ruang lingkup dari Hukum Administrasi Negara.

²⁵ Mira Hasti Hasmira, **Bahan Ajar Sosiologi Hukum**, Universitas Negeri Padang, Padang, 2015.

²⁶ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, **Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa**, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014. h. 191.

²⁷ Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, Rajawali Pers, Jakarta. 2006. hlm.311-312.

Dalam hukum acara peradilan administrasi mempunyai karakteristik yang tercermin dalam asas-asas hukum administrasi yang berdasarkan hukum acara peradilan administrasi. Asas-asas tersebut yaitu:

a. Asas praduga rechtmatig,
yaitu menurut Philipus M.Hadjon dengan asas ini setiap tindakan pemerintahan selalu harus dianggap rechtmatig sampai ada pembatalannya, rechtmatig mengandung makna keabsahan.

b. Asas pembuktian bebas
yaitu dimana sehubungan dengan pertanyaan siapakah yang harus menyerahkan suatu bukti tertentu, hakim administrasi adalah paling berkuasa. Hakim bebas dalam membagi beban pembuktian maupun dalam penilaian alat bukti.

c. Asas keaktifan hakim
dimana menurut J.A Borman ada dua sikap hakim dalam mengadili suatu sengketa. Pertama bersikap sangat formil yang hanya memperhatikan sebatas yang dikemukakan para pihak dan mencari kebenaran formal. Kedua, bersikap aktif yang dimana hakim berupaya mencari dan mengungkapkan fakta dan melengkapkan segi hukum dan mencari kebenaran materiil. Sikap hakim administrasi yaitu aktif. Sikap aktif tersebut dikarenakan mencari kebenaran atas peristiwa di muka peradilan administrasi merupakan kepentingan publik yang menurut hukum publik hakim harus diberi wewenang yang besar.

d. Asas Erga Omnes
Menurut Philipus M.hadjon adalah putusan berlaku bagi semua orang. Makna asas ini, putusan pengadilan dalam lingkup peradilan administrasi berlaku bagi siapa saja dan bukan hanya mengikat para pihak yang bersengketa.²⁸

²⁸ Suparto Wijoyo, **Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara) Edisi Kedua**, Airlangga University Press, Surabaya, 2005. hlm. 54-75.

2. Bentuk Jenis-Jenis Sanksi Administratif

Adapun bentuk jenis-jenis sanksi administratif dapat dilihat dari segi sasarannya, yaitu:

- a. Sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai suatu reaksi atas pelanggaran norma-norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran-pelanggaran, misalnya bestuursdwang, dwangsom).
- b. Sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah denda administrasi,
- c. Sanksi regresif artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang telah diterbitkan.

Di dalam hukum administrasi, secara umum ada beberapa macam sanksi di antaranya yaitu:

- a. Paksaan Pemerintahan

Paksaan pemerintahan adalah kewenangan untuk memperbaiki suatu keadaan yang terjadi terhadap berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum. Paksaan pemerintahan adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh badan pemerintahan terhadap tindakan pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi. Paksaan pemerintahan yang akan didapat, misalnya jika mendirikan bangunan tanpa memiliki perizinan.

Paksaan pemerintah merupakan suatu bentuk dari penegakan hukum administrasi. Paksaan yang dilaksanakan tersebut merupakan sebuah proses dalam menjalankan aturan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Peran aparat pemerintah dalam rangka menegakan aturan tersebut, menjadi sebuah bentuk dari peran aparat pemerintah dalam rangka menunjukkan fungsi dan posisinya sebagai penegakan hukum administratif.²⁹ Paksaan pemerintah yang ada merupakan sebuah langkah-langkah yang preventif, agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar kedepannya.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981. hlm. 221

b. Uang Paksa

Uang paksa adalah sanksi administrasi yang mempunyai tujuan untuk pemulihan ataupun perbaikan. Hal berarti uang paksa tujuannya untuk mengakhiri sebuah tindakan pelanggaran tertentu dan untuk mengembalikan pada keadaan yang sah menurut hukum. Uang paksa secara hukum administrasi adalah sebuah konsep hukuman administrasi diberikan kepada warga negara atau seseorang yang telah melanggar ketentuan yang ada, hal ini diterapkan sebagai salah satu jalan alternatif dari tindakan paksaan pemerintah.

c. Denda Administrasi

Denda administrasi adalah denda yang dijatuhkan oleh badan ataupun pejabat pemerintahan yang berwenang tanpa aksi campur tangan dari penuntut umum ataupun hakim pengadilan. Pengertian lainnya, denda administrasi adalah kewajiban tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang. Berdasarkan prinsipnya, penerapan denda administrasi bagi masyarakat adalah untuk dapat memulihkan kekayaan negara yang hilang dan pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat negeri/pejabat negara yang berwenang dalam bidangnya.³⁰

d. Penghentian Sementara

Sanksi penghentian sementara dan pencabutan izin diterapkan kepada pemegang perizinan yang telah melanggar peraturan perundang-undangan atau syarat-syarat perizinan.³¹

³⁰ Setiadi, W., **Sanksi Administrasi Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan**. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6, No. 4, 2018. Hlm. 604

³¹ Efendi A'an, Freddy Poernomo, **Hukum Administrasi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. hlm. 306.

C. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa "NKRI terdiri atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu terdiri dari kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu telah mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang".

Dalam pembagian beberapa wilayah negara menjadi daerah-daerah propinsi dan di dalam daerah propinsi terdiri dari daerah Kabupaten atau Kota, sekaligus sebagai pemerintah daerah. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai syarat kelengkapan penyelenggaraan Pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, maka dibentuk setiap lembaga perwakilan rakyat di daerah. Pemerintahan daerah di provinsi, daerah di kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Setelah Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah di provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.³²

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rencana untuk menjalankan tugas otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peraturan Daerah yaitu peraturan yang disahkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat formal tertentu untuk dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.³³

³² A. Zarkasi, **Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 4, April 2010, hlm.103.

³³ Irawan Soejito, **Teknik Membuat Peraturan Daerah**, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 8.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Bupati/Walikota).

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang sudah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan kesepakatan bersama Kepala Daerah (Bupati atau Walikota) yang terdiri

dari peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Hal itu diatur dalam pasal 1 angka 7 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan

persetujuan bersama Gubernur, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten

atau Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang telah dibentuk

oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota.³⁴

Dalam Peraturan Daerah juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu:³⁵

- a. Menjadi peraturan kebijakan untuk melaksanakan tugas bantuan dan untuk melaksanakan.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Maksud dari fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Menjadi penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 7 dan 8.

³⁵ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, **Panduan Praktik Memahami Perancangan Peraturan Daerah**, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta. 2005. hlm. 8.

d. Menjadi suatu alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangannya yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah berada pada urutan bawah namun dalam hal pengawasannya juga dilakukan sama seperti pengawasan-pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi oleh lembaga pemerintahan pusat yang memiliki kedudukan untuk melakukan tugas pengawasan hukum. Peraturan daerah tidak boleh dipandang sebagai produk hukum yang hanya bersifat lokal sehingga pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk melakukan laporan kepada kelembagaan negara di tingkat pusat maupun pada daerah provinsi.

Mengenai Peraturan Daerah ada asas-asas yang perlu diperhatikan, yaitu :³⁶

- a. Pengayoman

Mengandung Peraturan Perundang-undangan harus memiliki fungsi yaitu memberikan perlindungan guna untuk menciptakan ketentraman dan kesejukan di dalam masyarakat.

³⁶ *Ibid.* hlm. 10-11

b. Kemanusiaan

Mengandung Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan penghormatan maupun perlindungan kepada hak-hak asasi manusia dan juga menghormati dan melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia.

c. Kebangsaan

Mengandung Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda-beda dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Mengandung Peraturan Perundang-undangan harus bermusyawarah untuk mencapai suatu mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Mengandung Peraturan Perundang-undangan wajib selalu melihat pentingnya yang ada di Indonesia dan materi Peraturan Perundangundangan yang dibentuk di daerah adalah bagian dari sistem hukum nasional yang didasarkan atas Pancasila.

f. Bhinneka Tunggal Ika

Mengandung Peraturan Perundang-undangan harus selalu memperhatikan adanya keragaman penduduk, suku, golongan, agama, dan budaya khususnya yang menyangkut berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Mengandung Peraturan Perundang-undangan harus bersikap adil kepada setiap warga Negara tanpa terkecuali.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Mengandung Peraturan Perundang-undangan tidak diperbolehkan akan hal yang merujuk kepada membedakan agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Mengandung Peraturan Perundang-undangan harus tertib dalam masyarakat dan menjamin adanya kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Mengandung Peraturan Perundang-Undangan harus seimbang, serasi, dan selaras, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) diperlukan keterbukaan. Keterbukaan kepada masyarakat, baik dalam proses perancangan, persiapan, penyusunan, dan juga keterbukaan perlu di dalam pembahasan Peraturan Daerah. Keterbukaan itu dapat diberikan dengan cara memberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau juga memberikan saran-saran yang baik lisan maupun dengan cara tertulis.

D. Tinjauan Tentang Rokok

1. Pengertian dan Kandungan Rokok

Pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, Rokok yaitu gulungan tembakau yang dibalut dengan daun nipah, sedangkan merokok adalah menghisap gulungan tembakau yang dibungkus dengan kertas. Zat Adiktif yang terdapat dalam sebatang rokok merupakan zat yang paling berbahaya bagi kesehatan. Zat adiktif adalah sejenis obat-obatan serta bahan aktif yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus berkelanjutan.³⁷ Zat Adiktif itu sendiri dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit paru-paru obstruktif kronik, penyakit jantung, stroke, kanker paru-paru, kanker mulut, kelainan kehamilan dan janin, dan impotensi.

Pada asap tembakau terdapat lebih dari 4.000 bahan kimia telah ditemukan yang dimana banyak diantaranya dari 4.000 bahan kimia tersebut adalah racun dan beberapa dari racun itu bersifat radioaktif dan lebih dari 40 diketahui dapat menyebabkan kanker. Bahan-bahan kimia ini terutama terdapat di dalam tar yaitu cairan berwarna cokelat memiliki

³⁷ Admin. **Zat Adiktif**. 2017. Diambil dari https://id.wikipedia.org/wiki/Zat_adiktif, Diakses pada tanggal 27 Mei 2021.

sifat lengket yang terkondensasi dari asap tembakau. Tembakau banyak menghasilkan bahan kimia yang berasal dari rokok jika nantinya suhunya tinggi (hingga 900° C) yang ditimbulkan dari ujung rokok yang menyala ketika dihisap oleh perokok.³⁸

Sebatang rokok terdapat kandungan berupa tembakau yang dimana tembakau itu menjadi penyebab utama untuk timbulnya penyakit.

Setiap jenis dan merk rokok itu di dalamnya mengandung ukuran zat kimia yang berbeda-beda. Tetapi yang paling sering yaitu nikotin, tar, dan karbon monoksida.³⁹

a. Tar

Senyawa polinuklir hidrokarbon aromatik yang mempunyai sifat karsinogenik. Dengan jenis cairan yang mempunyai warna coklat tua atau hitam yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru sehingga dapat membuat warna gigi dan kuku seorang perokok menjadi coklat, begitu juga di paru-paru. Tar yang ada dalam asap rokok menyebabkan paralisesilia yang ada di saluran pernafasan dan menyebabkan penyakit paru lainnya seperti emphysema, bronkitis, kronik dan kanker paru-paru.

b. Nikotin

Komposisi senyawa pirridin yang terdapat dalam Nicotiana tabacum, Nicotiana glauca dan spesies lainnya yang mempunyai sifat adiktif dan dapat menyebabkan ketergantungan. Nikotin bersifat sangat adiktif, beracun dan tidak berwarna. Nikotin yang dihirup dari asap rokok masuk ke paru-paru dan masuk ke dalam aliran darah kemudian masuk ke dalam otak perokok dalam waktu 7-10 detik. Nikotin yang terkandung dalam rokok adalah sebesar 0,5-3 nanogram dan semuanya diserap sehingga di dalam cairan darah ada 40-50 nanogram nikotin setiap 1 ml nya. Nikotin memiliki efek adiktif dan psikoaktif yang dapat merangsang terjadinya sejumlah reaksi kimia yang dapat mempengaruhi hormon dan neurotransmitter seperti

³⁸ M Yunus, **Kitab Rokok**, Kutub, Yogyakarta. 2009 hlm. 56.

³⁹ Jaya M, **Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok**, Rizma, Jakarta. 2009. hlm. 25.

adrenalin, dopamine, dan insulin sehingga membuat sensasi yang nikmat pada rokok seketika tetapi sensasi ini hanya berlangsung sementara.

c. Karbon Monoksida

Zat beracun yang sifatnya tidak berwarna dan tidak berbau. Komponen yang dihasilkan oleh pembakaran tidak sempurna dari komponen zat arang atau karbon. Gas CO yang dihasilkan sebatang tembakau dapat mencapai 3%-6% dan gas ini dapat dihisap oleh siapa saja. Manusia yang merokok hanya menghisap satu pertiga bagian saja, yaitu arus tengah sedangkan arus pinggir tetap diluar. Bila proses ini dilakukan terus menerus maka pembuluh darah semakin mudah rusak dengan terjadinya proses aterosklerosis (penyempitan). Penyempitan pembuluh darah terjadi dimana-mana yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran hingga kematian.

Bahayanya rokok itu bagi kesehatan kita dengan adanya zat beracun yang ada di dalam sebatang rokok. Penggunaan rokok tidak hanya berbahaya bagi mereka yang mengonsumsinya tetapi juga sangat menimbulkan kerugian orang yang ada disekitar si perokok. Seseorang yang tidak merokok tetapi karena keadaan sekitar yang dimana seseorang yang tidak merokok itu mau tidak mau juga harus menghirup asap rokok dari seseorang perokok biasanya kita kenal dengan sebutan perokok pasif. Tembakau merupakan penyebab kematian didunia ini yang sebenarnya dapat dicegah dan tembakau ini merupakan faktor kematian paling sedikit 4,2 juta.⁴⁰

Beberapa perokok pasif lainnya, asap rokok merupakan sesuatu yang sangat tidak disukai dan sangat mengganggu. Banyak penyakit yang bermunculan menjadi penyebab seperti meningkatnya resiko penyakit saluran pernafasan seperti paru-paru dan bronkhitis, meningkatnya resiko kanker paru-paru dan serangan jantung, juga terjadinya gangguan pada mata yang dapat menimbulkan sakit, bersin dan batuk-batuk karena

⁴⁰ Santosa, *Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Peningkatan Kesehatan Masyarakat*, Jurnal ISSN, Vol.10 No.2, April 2013, hlm. 178.

alergi, sakit pada kerongkongan dan tenggorokan, dan juga bisa juga karena fotor badan yang menolak adanya zat nikotin ini terjadi sakit kepala dan sesak nafas.

Asap rokok orang lain merupakan salah satu faktor resiko berbagai masalah kesehatan. Asap perokok dapat menyebabkan penyakit jantung dan meningkatkan sekiranya 30% resiko dari kematian. Sementara efek perokok pada saat kehamilan dapat menyebabkan bayi lahir premature, Sindroma Kematian Bayi Mendadak, dan efek pada bayi berupa pertumbuhan janin dalam rahim terhambat dan keguguran spontan.⁴¹

Salah satu penyebab meningkatnya kematian tertinggi di dunia ini adalah Rokok. Faktor ekonomi menjadi salah satu dampak yang lebih berbahaya. Menurunnya daya produksi perusahaan dan daya produksi nasional merupakan salah satu penyebab merosotnya daya kerja masyarakat. Karena jika kita merokok satu bakan itu artinya orang yang merokok itu menjadi kehilangan waktu kerja yang produktif.

Dengan hal itu orang yang merokok itu menjadi malas-malasan dan suka menunda-nunda pekerjaannya. Dengan berbagai penyakit akibat rokok itu tandanya mengurangi potensi sumber daya manusia yang ada saat ini. Ditemukan dalam asap rokok menimbulkan sedikitnya 25 macam penyakit, mulai dari penyakit alunan pernafasan, Kanker Paru-Paru, penyakit pembuluh darah, Impotensi, Stroke, hingga Kanker Kandung Kemih. Dari semua itu Kanker Paru-Paru yang terawat di peringkat pertama.⁴²

Penyebab merokok itu dapat dari orang-orang disekeliling perokok. Bisa dari pengaruh orangtua, pribadi diri sendiri, iklan, maupun dari faktor ekonomi. Penyebab orang tua sangat memberikan akibat terhadap orang yang merokok. Seorang anak yang berasal dari rumah tangga yang tidak berjalan bahagia yang dimana biasanya orang tua anak tersebut sering melakukan kekerasan fisik terhadap anak tersebut atau juga sering

⁴¹ Nurjanah, **Gangguan Fungsi Paru dan Kadar Cotine pada Urin Karyawan yang Terpapar Asap Rokok Orang Lain**, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 10 No. 1, Juli 2014, hlm. 44.

⁴² Kementerian Kesehatan RI, Op.cit, hlm. 12-13.

Cerutu berbeda dengan rokok dalam hal ukuran dan pengemasan. Ukuran cerutu berbeda dengan rokok, cerutu lebih besar. Pengemasan tembakau, bukan kertas atau daun jagung kering. Cerutu juga memiliki campuran tembakau yang sangat padat

sehingga biasanya satu batangnya bisa diisap berkali-kali atau secara bertahap.

E. Tinjauan Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Menurut peraturan daerah (perda) kota Yogyakarta Pasal 1 ayat (1) nomor 2 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok, yaitu kawasan yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.⁴⁵

Kurangnya pengertian masyarakat sekitar bahayanya merokok itu telah diabaikan oleh masyarakat sekitar dan kurangnya pengertian tersebut telah membuat dan menjadi alasan sulitnya menerapkan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok ini. Dapat dilihat dari perokok yang masih berusia sangat muda sudah mulai merokok.

Sedangkan pada orang tua merupakan pengguna rokok yang termasuk rendah. Perihal ini kebanyakan perokok usia yang sangat muda atau usia produktif. Dengan menetapkan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok itu menjadi salah satu upaya dalam pengendalian asap rokok yang kita ketahui sangat berbahaya pada kesehatan baik kesehatan perokok aktif maupun juga perokok pasif yang dimana semua orang punya hak untuk menghirup udara yang bersih.

Beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (Selanjutnya dapat disebut sebagai KTR) adalah Jakarta, Bogor, Palembang, Bali, dan Yogyakarta dan masih banyak lagi daerah di Indonesia yang sudah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.⁴⁶

Dalam pasal 3 peraturan daerah (perda) kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok menjelaskan tujuan dari peraturan daerah tersebut:⁴⁷

⁴⁵ **Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok**, BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1.

⁴⁶ Muhammad Jufri, **Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Efektivitas Area Kawasan Tanpa Rokok di Pondok Pesantren Nurul Falah Kawatuna Kota Palu**, Jurnal Kesehatan Tadulako, Vol. 1 No. 2, Juli 2015. hlm. 1

⁴⁷ **Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok**, BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 3.

"Perlindungan Kesehatan untuk perseorangan, untuk keluarga, untuk masyarakat dan untuk lingkungan dari bahaya komposisi yang terkandung karsinogen dan zat adiktif dalam memproduksi Rokok yang dapat menimbulkan penyakit, kematian dan membuat turun kualitas kehidupan;

Untuk melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk pengangkutan penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk Rokok;
Meningkatkan kesadaran dan masyarakat harus lebih waspada terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
Melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok disekitar perokok."

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah berlaku di beberapa tempat, yaitu:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Tempat proses belajar-mengajar;
3. Tempat anak bermain;
4. Tempat ibadah;
5. Angkutan umum;
6. Tempat kerja; dan
7. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Didalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak terlepas dari beberapa teori filosofis, sosiologis, dan yuridis yang dimaksudkan dalam landasan filosofis adalah kondisi sehat, baik secara fisik seseorang, mental seseorang maupun sosial seseorang, merupakan keinginan setiap orang dengan salah satu cara ialah untuk tertib terhadap Kawasan Tanpa Rokok. Bahkan undang-undang kesehatan menambahkan aspek spiritual dalam definisi sehat yang digunakannya. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesehatan misalnya unsur dalam kesejahteraan yang harus diwujudkan sama dengan keinginan bangsa Indonesia seperti tercantum dalam Pancasila dan UUDNRI 1945.

Pada kenyataannya nilai sosiologis menyatakan bahwa rokok sangat banyak diminati oleh banyak kalangan mulai dari kalangan atas, menengah,

dan bawah hingga rokok telah mengorbankan berjuta-juta orang dimuka bumi ini pada kematian. Khususnya masyarakat Indonesia sangat menyukai merokok hal ini bisa dilihat dari beberapa perusahaan rokok di Indonesia terbilang sukses, kebiasaan merokok itu sendiri bukan budaya asli bangsa Indonesia.

Kebiasaan merokok dibawa oleh bangsa penjajah dan menjadi kebiasaan masyarakat. Kebiasaan yang tidak baik nantinya tidaklah harus dipertahankan. Pembiasaan sejarah oleh sebagian kaum elit didasarkan karena upaya yang dilakukan oleh perusahaan rokok untuk mempertahankan pasarnya di Indonesia. Sementara di seluruh dunia peredaran dan penggunaan produk tembakau semakin dibatasi, maka industri tembakau sangat tergantung pada negara-negara berpenduduk besar seperti Indonesia yang juga sangat konsumtif terhadap tembakau.

Selama ini perusahaan rokok menggunakan berbagai cara media dan media massa telah merubah tatanan sosial masyarakat, yang tadinya perilaku tidak baik menjadi sesuatu dibanggakan, kesenangan dan berbagai kesalahan dalam pola pikir kehidupan sosial masyarakat. Banyak aktivitas didalam masyarakat yang disampingkan dengan merokok misalnya saat berkumpul dengan teman, agama, bahkan didalam lingkungan keluarga. Dalam hal sektor usaha rokok sangat menjanjikan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar terhadap hal itu pemerintah melakukan pertimbangan melarang pembuatan, peredaran dan penggunaan rokok.

Tetapi pada kenyataannya merokok lebih banyak kerugiannya daripada manfaat yang didapatkan. Oleh karena itu melalui peraturan daerah ini sebagai penyeimbang agar terwujud kesehatan masyarakat yang optimal dan tanggung jawab pemerintah untuk memberi kesempatan bagi sektor usaha untuk berperan serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara serta menyediakan lapangan kerja khususnya masyarakat Kota Yogyakarta.

Kemudian yang dimaksud dengan teori yuridis ialah suatu regulasi dalam rangka menciptakan kepastian hukum tetapi juga dimaksudkan sebagai pembelajaran yang akan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku kooperatif dengan hukum berupa peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

F. Tinjauan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.⁴⁸ Dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta yang disetujui oleh Gubernur Kota Yogyakarta.

Dalam merancang Peraturan Daerah tidak hanya DPRD, namun terdapat beberapa pihak dari luar dalam merancangannya hingga disahkan. Berkaitan dengan adanya DPRD, membentuk Peraturan Daerah wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah.

Tujuan dari pemerintahan Kota Yogyakarta dalam penetapan wilayah KTR adalah:

1. Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
2. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.
3. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.
4. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.
5. Mewujudkan generasi muda yang sehat.

Dalam penegakan KTR pemerintah Kota Yogyakarta memberikan sanksi administratif berupa :⁴⁹

1. Peringatan lisan;
2. Peringatan tertulis; dan/atau
3. Dipublikasikan.

⁴⁸ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Merokok, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

⁴⁹ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Merokok, Bab III Tanggungjawab dan Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 18.

G. Tinjauan Teori Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Dalam penelitian ini menggunakan Teori Green yang mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat menjadi 3 komponen utama, komponen predisposisi, komponen pemungkin, dan komponen penguat.

Landasan teori Green mencoba menganalisis perilaku manusia satu dengan yang lainnya dari tingkat kesehatan. Kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh dua komponen pokok, yakni komponen perilaku dan komponen di luar perilaku. Perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh ilmu pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, dan sebagainya dari orang atau masyarakat yang saling berhubungan. Di samping itu, terdapat fasilitas, sikap, dan perilaku petugas terhadap kesehatan juga akan mendukung dan memperkuat terbentuknya perilaku.



BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta

1. Profil Kota Yogyakarta

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat Pertama yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, dengan syarat dan cara pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat Kedua yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Kedua dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat Kedua seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan-kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

2. Visi dan Misi Yogyakarta

Adapun visi dan misi dari Kota Yogyakarta yang tertuang dalam situs resmi jogjakota.go.id sebagai berikut:

VISI KOTA YOGYAKARTA

Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan.

MISI KOTA YOGYAKARTA

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.
- b. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta.
- c. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta.
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
- e. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan.
- f. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman.
- g. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih.⁵⁰

3. Keadaan Geografis Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta berkategori ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan satu-satunya tingkat II yang status kota disamping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus di kabupaten.

Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Bagian Utara: Kabupaten Sleman.

Bagian Timur: Kabupaten Bantul & Sleman.

Bagian Selatan: Kabupaten Bantul.

Bagian Barat: Kabupaten Bantul dan Sleman.

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara 110° 24' 19" sampai 110° 28' 53" Bujur Timur dan 7° 15' 24" sampai 7° 49' 26" Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut.

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit jika perbandingan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 di Kecamatan, 45 di Kelurahan, 617 di RW, dan 2.531 di RT,

⁵⁰ Admin. **Website Resmi Pemerintahan Kota Yogyakarta**, 2021. Diambil dari <https://www.jogjakota.go.id/>, Diakses pada tanggal 27 Mei 2021.

Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: situs resmi Kota Yogyakarta, www.iogjakota.go.id.

B. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Kantor Dinas Kesehatan Yogyakarta merupakan perangkat Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas untuk membantu Walikota Yogyakarta terkhusus pada Bidang Kesehatan yang mempunyai alamat di Kompleks Balaikota Kota Yogyakarta, Jalan Kenari No.56, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta.

Kemajuan dalam bidang kesehatan merupakan suatu bagian dari kemajuan nasional yang mempunyai tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar menciptakan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dinas Kesehatan kota Yogyakarta mempunyai visi dan misi yang sama dengan kota Yogyakarta. Berikut merupakan informasi dari gambaran umum Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang didapatkan dari situs resmi Dinas Kesehatan Yogyakarta (<https://kesehatan.jogjakota.go.id/>):⁵¹

1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Adapun visi dan misi dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, yaitu sebagai berikut:

Visi

Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan

Misi

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat;
- b. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta;
- c. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta;
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya;
- e. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan Membangun sarana prasarana publik dan permukiman; dan
- f. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih.

⁵¹ Admin. **Situs Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta**. 2021. Diambil dari <https://kesehatan.jogjakota.go.id/beranda>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2021.

2. Maksud dan Tujuan

Pada intinya, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dari berdirinya Dinas tersebut adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan berbagai indikator sebagai berikut:

- a. Mengurangi Jumlah Kematian Ibu;
- b. Mengurangi Angka Kematian Bayi;
- c. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang; dan
- d. Prevalensi Stunting.

3. Pejabat Struktural

Pejabat struktural dalam Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Kepala : drg. EMMA RAHMI ARYANI ,M.M.
- b. Sekretaris : Ary Iryawan, S.I.P.
- c. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan: TRISNI WINARSIH, S.K.M., M.M.
- d. Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat: drg. YUDIRIA AMELIA B.
- e. Kepala Bagian Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan: dr. LANA UNWANAH.
- f. Kepala Bagian Pelayanan Kesehatan: Dra. ARROSIANTI ZHRULFALASIFAH, Apt.
- g. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: TRI PARYATI, S.K.M., M.K.M.
- h. Kepala Sub Bagian Keuangan: SRI FAJAR ASTUTI, S.E.
- i. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan: ISWARI PARAMITA, S.K.M., M.P.A.
- j. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan: dr. A. S. WILLIAMTO
- k. Kepala Seksi Sertifikasi dan Lisensi Kesehatan: EKO RAHMADI, S.K.M., M.P.H.
- l. Kepala Seksi Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman: drg. AMBARWATI TRIWINAHYU
- m. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi: dr. RISKANOVRIANA

- n. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga: NUR WARA GUNARSIH, A.Md.AK.
- o. Kepala Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat: drg. ARUMI WULANSARI, M.P.H.
- p. Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi: dr. ENDANG SRI RAHAYU
- q. Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa: dr. IVA KUSDYARINI
- r. Kepala Seksi Surveilans Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan: Drs. SOLIKHIN DWI RAMTANA, Apt. M.P.H.
- s. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Komplementer: drg. AAN ISWANTI
- t. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan: dr. OKTO HERU SANTOSA
- u. Kepala Seksi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan: drg. UMI NUR CHARİYATI, M.P.H.

C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta

1. Sejarah Satpol PP

Mulai berlaku Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah membentuk wadah Satuan Polisi Pamong Praja yang bertingkat Non Struktural, dan letaknya tepat berada di bawah Biro Tata Pemerintahan dan diatur dengan beberapa Keputusan Gubernur DIY. Kategori anggota Polisi Pamong Praja suatu Perangkat wilayah di Daerah, termasuk pada hal ini adalah anggota Polisi Pamong Praja yang berada di Tingkat Kecamatan. Dengan demikian sangat jelas bahwa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota tidak memiliki aparat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah.

Setelah Tahun 2000 seluruh Kabupaten/Kota membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan

ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

Tetapi nama organisasi atau lembaga tidak berseragam, ada yang menamakan Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dinas Trantibum), ada juga menyebut dengan nama Dinas Polisi Pamong Praja, ada yang memberi nama Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dan ada pula yang memberikan nama Dinas Pol PP dan Ketertiban Masyarakat maupun Dinas Trantib dan Linmas.

Sesuai pesan dalam UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pada Tahun 2003 Pemerintah Provinsi DIY (dalam hal ini Biro Tata Pemerintahan dan Biro Organisasi Setda Provinsi DIY) mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Satpol PP Kota Yogyakarta. Perancangan Peraturan Daerah tersebut pada saat pembahasan di tingkat eksekutif dan/atau legislatif yang semula bernama Satuan Polisi Pamong Praja, lalu mengubah dan menetapkan nama lagi menjadi Badan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Setelah itu pada akhir perbincangan di lembaga eksekutif hingga di bahas akhir di legislatif, dengan alasan mengenai jumlah Dinas yang boleh dibentuk, maka nama Badan Ketentraman dan Ketertiban Umum berubah menjadi Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum. Perubahan nama yang awalnya Satpol PP menjadi Dinas Trantibum dengan alasan pemahaman mengenai kategori dan keberadaan Satpol PP dengan keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pada saat dilakukannya pembahasan organisasi/kelembagaan yang kemudia ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1, 2 dan 3 Tahun 2004 sebenarnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satpol PP maupun Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tersebut, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja telah diatur secara jelas dan tegas sebagai Perangkat Pemerintah Daerah, namun dengan berbagai pertimbangan akhirnya eksekutif dan legislatif untuk sementara membentuk Dinas Trantibum Provinsi DIY yang mengemban fungsi dan tugas di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta fungsi Perlindungan Masyarakat. Dan selanjutnya mengenai keberadaan organisasi Satpol PP akan dikaji kembali pada perubahan organisasi dimasa yang akan datang.⁵²

2. Visi dan Misi Satpol PP Kota Yogyakarta

Adapun visi dan misi dari Satpol PP Kota Yogyakarta, yang dapat diketahui sebagai berikut:⁵³

Visi

Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan.

Misi

- Mewujudkan penegakan dalam peraturan perundang-undangan menjadi lebih inovatif, responsif, dan kompeten.
- Mewujudkan kondusifitas masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

3. Kelembagaan dan Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan unsur Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana sebagian kewenangan daerah di bidang pembinaan ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.

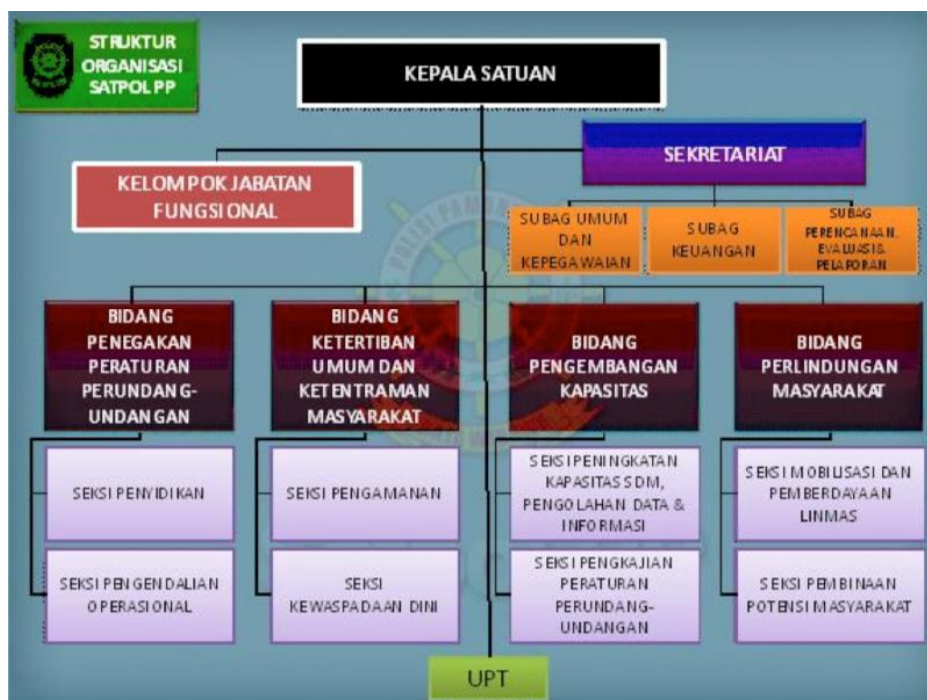
Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Polisi Pamong Praja yang sebelumnya berada di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta akan memasuki babak baru dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, dimana dalam Perda tersebut mengatur pergantian nama dan struktur organisasi. Mulai tahun 2017, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta berganti nama menjadi Satuan Polisi Pamong Praja.

⁵² Admin. **Sejarah**. 2021. Diambil dari <https://satpolpp.jogjaprov.go.id/v2/profil-satpol-pp-diy/sejarah/>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2021.

⁵³ Admin. **Visi Misi**. 2021. Diambil dari <https://polpp.jogjakota.go.id/page/index/visi-misi>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2021.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta terdiri dari 4 bidang dan 1 sekretariat, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Satpol PP Kota Yogyakarta



Sumber: Situs resmi Satpol PP Kota Yogyakarta, 2021.
www.polpp.jogjakota.go.id.

Kemudian, jumlah dari personil Satpol PP Kota Yogyakarta sebagai berikut:

- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (1 orang)
- Sekretaris (1 orang)
- Kepala Bidang (4 orang)
- Kepala Seksi (8 orang)
- Anggota Satpol PP (158 orang)
- Pegawai Satpol PP Non PNS : (71 orang)

D. Penegakan Hukum Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Pasal 18 Ayat (1) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Setiap tahun frekuensi penderita penyakit kronis akibat rokok semakin meningkat. Walaupun sudah jelas di beberapa tulisan-tulisan bahwa “merokok membunuhmu”, tetapi perokok masih saja tak mengabaikan kondisi Kesehatan dirinya. Rokok memiliki rasa kecanduan. Di dalam rokok terkandung zat yang bernama nikotin. Zat inilah yang bisa menimbulkan efek santai dan membuat kebiasaan merokok sulit untuk ditinggalkan. Apabila asap rokok dihirup yang bukan perokok, bahaya yang di tanggung bisa tiga kali lipat. Terdapat 25 % zat berbahaya yang terkandung dalam rokok masuk ke dalam tubuh perokok, sedangkan 75 % beredar di udara bebas yang beresiko masuk ke tubuh orang lain. Tidak ada lagi batas aman dari asap rokok. Sehingga sangat perlu untuk menerapkan langkah untuk kawasan tanpa rokok atau yang biasa disingkat KTR. Perlunya KTR juga menjadi instruksi untuk pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan pelarangan merokok di tempat-tempat yang ditentukan. Hal ini termuat pada Peraturan Pemerintahan No 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Pasal 25 yang diberikan tugas kepada Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok.⁵⁴

Masalah rokok dari dahulu hingga kini masih menjadi permasalahan dunia khususnya terhadap kesehatan, semakin tingginya jumlah perokok di Indonesia termasuk Kota Yogyakarta dalam menangani masalah rokok. Pemerintah kota Yogyakarta membuat Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Urusan dari Penegakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yaitu masih banyak pelanggaran merokok di KTR karena belum diterapkannya sanksi yang tegas untuk pelaku yang melanggar Peraturan Daerah serta tingkat pengawasan masih lemah belum adanya tindakan divisi dan hanya pembinaan didalam masyarakat.

⁵⁴ Fachrizal David. **Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Inco Soroako**. Skripsi: Universitas Hasanuddin, Makassar. 2018. hlm. 2.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau aktivitas memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan antara lain pelayanan kesehatan, tempat pelaksanaan belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok menerangkan bahwa seseorang yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan ketentuan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).⁵⁵

Dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, ditetapkan lokasi yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok meliputi: Pelayanan kesehatan, Tempat pelaksanaan belajar mengajar, Tempat anak bermain, Tempat ibadah, Angkutan umum, Tempat kerja dan Tempat umum. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.⁵⁶

Adapun sanksi administratif dalam Pasal 18 Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok berupa :⁵⁷

1. Peringatan lisan;
2. Peringatan tertulis; dan/atau
3. Dipublikasikan.

Hukum merupakan bagian terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai macam konsep dituangkan mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman seputar hakikat hukum yang berlaku dan kebijakan publik yang memiliki focus yang sama yaitu pada nilai, tujuan, dan sarana. Salah satu

⁵⁵ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, BAB VIII Ketentuan Pidana Pasal 25.

⁵⁶ Meysi Ariska, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 5, No. 1, 2017. hlm. 46-47.

⁵⁷ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, BAB III Tanggungjawab dan Kewajiban Pasal 18.

sarana yaitu Peraturan Perundang-undangan, melalui pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga mempunyai sifat mengikat bagi seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu, pada hakikatnya hukum pun mengandung nilai, konsep hukum, tujuan hukum yang mana mewujudkan ide dan tujuan merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Idealnya kebijakan publik merupakan hak rakyat dan merupakan bagian dari kewajiban Negara (state obligation) maka sudah seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya sebagai aparatur negara.

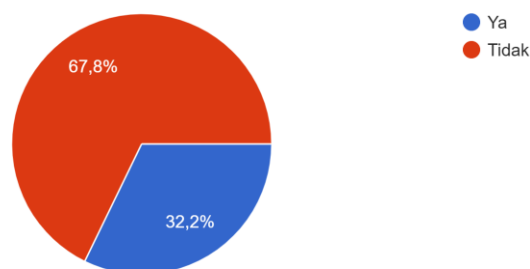
Demikian kebijakan dalam sektor kesehatan yang sering menjadi perhatian khusus, misal dalam masalah pencemaran udara yang disebabkan rokok.

Dalam pembuatan kebijakan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok komitmennya pemerintah kota Yogyakarta untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga kotanya dari terkena asap perokok, memberikan kawasan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan melindungi kesehatan masyarakat perokok maupun bukan perokok dari dampak buruk asap rokok baik langsung maupun secara tidak langsung. Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Daerah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk memberikan pengamanan dan melaksanakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan masyarakat sekitar Kawasan Tanpa Rokok setempat untuk memastikan bahwa semua orang mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk menjadikan Kawasan Tanpa Rokok secara penuh, tahu dimana orang tidak boleh merokok dan dimana boleh merokok. Agar mendapatkan efek kepada pelanggar maka penanggung jawab KTR memberikan sanksi administratif.

Apakah menurut anda sanksi tersebut sudah sesuai?

59 jawaban



Berdasarkan hasil diagram diatas menjelaskan bahwasannya masih banyak para pengunjung di Kawasan Malioboro yang belum merasa puas terhadap sanksi yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan wisatawan bernama Evelyn Sisilia berasal dari Makassar, bahwa saudari menjelaskan mengetahui adanya peraturan tersebut dikarenakan sudah melihat tanda dilarang merokok di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. Menurut saya peraturan tersebut belum berjalan dengan baik, masih perlu perbaikan, dan pihak yang bertanggung jawab harus lebih tegas dalam menjalankan peraturan tersebut.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan wisatawan bernama Indhika Revania berasal dari Bogor, bahwa saudari menjelaskan tidak mengetahui adanya peraturan tersebut dikarenakan tidak mengetahui tanda dilarang merokok di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. Menurut saya peraturan tersebut harus ada perbaikan di lapangan. Tanggapan saya jika benar ada peraturan tersebut baik untuk masyarakat yang tidak merokok, ditambah lagi baik untuk Kesehatan.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pedagang rokok bernama Rizki Aditya berasal dari Lampung, bahwa saudari menjelaskan mengetahui adanya peraturan tersebut dikarenakan sudah melihat tanda dilarang merokok di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. Menurut saya peraturan tersebut berjalan biasa, hanya saja saya sebagai pedagang rokok yang bukan berasal

⁵⁸ Hasil wawancara dengan responden Evelyn Sisilia, *wisatawan*, pada hari Selasa tanggal 22 April 2021, pukul 15.45 WIB.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan responden Indhika Revania, *wisatawan*, pada hari Selasa tanggal 22 April 2021, pukul 16.00 WIB.

dari kota Yogyakarta merasa dirugikan karena mata pencaharian saya dari jualan.⁶⁰

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu drg. Arumi Wulansari, MPH., selaku Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bahwa Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Beliau menjelaskan bahwa penerapan dari KTR di beberapa kawasan Yogyakarta ini diberlakukan sejak tahun 2018. Namun hal yang disayangkan terdapat kawasan yang rentan melakukan suatu pelanggaran terhadap KTR ini, yaitu kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Beliau juga menjelaskan bahwa penerapan pemberian sanksi administratif terhadap para pelanggar masih belum optimal, karena masih dilakukan pengkajian dalam melakukan penerapan denda. Bahwa selama ini, meskipun di dalam peraturan daerah memuat adanya denda, Pemerintah Kota Yogyakarta masih belum menerapkannya. Perokok hanya mendapatkan teguran dari petugas.⁶¹

Dan dalam penelitian ini peneliti juga melakukan wawancara terhadap Bapak Budi Santosa, SIP., selaku Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta. Dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Satpol PP Kota Yogyakarta melakukan penertiban bersama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Dalam upaya yang dilakukan baru sampai pembinaan mulai dari kompleks Balai Kota hingga tempat khusus. Belum adanya tindakan divisi tetapi adanya tim (Dinas Sosial, Satpol PP, dan lain-lain) yang bertanggung jawab terhadap KTR. Apabila melanggar akan dikenai sanksi administratif. Didalam Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak ada sanksi administrasi. Tetapi untuk tindak lanjut dari Perda tersebut yaitu Peraturan Wali Kota Nomor

⁶⁰ Hasil wawancara dengan responden Rizki Aditya, *pedagang rokok*, pada hari Rabu tanggal 23 April 2021, pukul 15.00 WIB.

⁶¹ Hasil wawancara dengan responden drg. Arumi Wulansari, MPH., selaku *Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta*, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, pukul 13.00 WIB.

22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.⁶²

Dalam Pasal 4 Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok mengatur tentang tata cara pengenaan sanksi administratif berikut ini :⁶³

Pasal 4

"(1) Pengelola atau penanggungjawab KTR wajib:

- a. Memasang papan pengumuman KTR dengan memuat tanda larangan merokok, larangan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk rokok, tulisan/gambar tentang bahaya rokok;
- b. Tidak sedia asbak di Kawasan Tanpa Rokok;
- c. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
- d. Memasang tanda, tulisan/gambar tentang bahaya rokok; dan
- e. Melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan setiap 6 (enam) bulan.

(2) Pengelola atau penanggungjawab KTR pada tempat kerja dan tempat umum wajib menyediakan tempat khusus merokok.

(3) Pengelola atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terkena sanksi administratif."

⁶² Hasil wawancara dengan responden Budi Santosa, SIP., selaku Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta., pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, pukul 10.00 WIB.

⁶³ **Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok**, Pasal 4.

Tindak lanjut dari dari Pasal 4, terdapat Pasal 5 mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif yaitu:

1. Dikenakan peringatan lisan dan apabila peringatan lisan tidak diindahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dikenakan surat peringatan tertulis pertama;
2. Apabila surat peringatan tertulis pertama tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka dikenakan surat peringatan tertulis kedua;
3. Apabila surat peringatan tertulis kedua tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka dikenakan surat peringatan tertulis ketiga;
4. Apabila surat peringatan tertulis ketiga tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka pelanggaran oleh pengelola atau penanggungjawab KTR akan dipublikasikan kepada masyarakat;
5. Pengelola atau penanggungjawab KTR yang dipublikasikan karena pelanggarannya, tetap diwajibkan memenuhi kewajibannya;
6. Pengelola atau penanggungjawab KTR yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, akan dipulihkan nama baiknya;
7. Pengelola atau penanggung jawab KTR yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada huruf e yang berstatus pada instansi pemerintah, apabila tetap tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pembinaan berasal dari kata bina, pembinaan [pem·bi·na·an] yaitu suatu proses, cara, perbuatan membina pembaharuan; penyempurnaan; usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara menghasilkan sesuatu dan tepat pada tujuan yang diinginkan untuk memperoleh hasil yang lebih baik .⁶⁴ Pembinaan saja tidak menjamin kepatuhan masyarakat dalam penegakan hukum. Diperlukan sanksi hukum administratif mulai dari yang paling ringan berbentuk teguran lisan dan tertulis sampai dengan denda dan pencabutan izin usaha yang ditetapkan melalui persidangan.

Sanksi hukum bukan bertujuan untuk menghukum karena pelanggaran bukan bersifat kriminal tetapi untuk pembinaan dan lebih bersifat edukatif.

⁶⁴ Depdikbud, RI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, h. 243.

Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan upaya status kesehatan, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat Kota Yogyakarta untuk selalu membiasakan pola hidup sehat.

Dalam hal ini, banyak pihak yang akan bertanggung jawab terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok antara lain peradilan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan mempunyai kewajiban yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat.

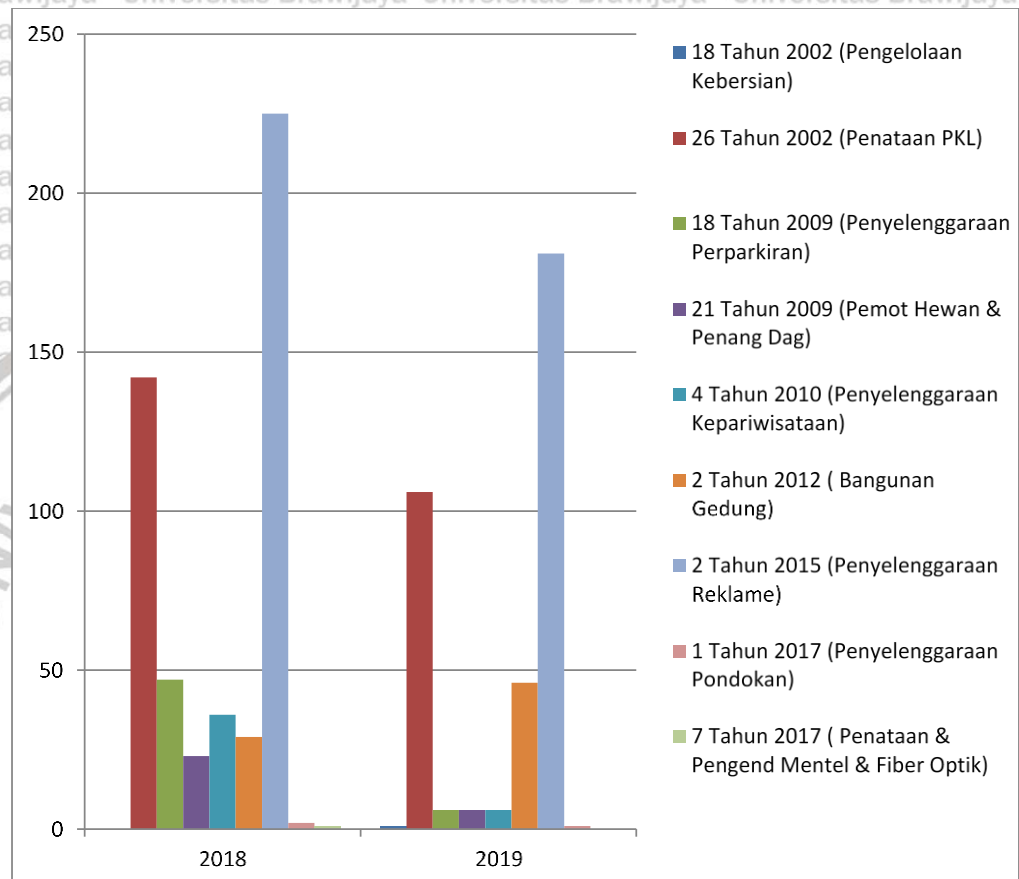
Bagian proses patuh terhadap Perda tersebut harus adanya saling komunikasi yang dilakukan dengan sosialisasi ke kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta, adanya penegak hukum khusus untuk Kawasan Tanpa Rokok (KTR), sikap penegak hukum dengan masyarakat harus sadar akan pentingnya hidup sehat terutama pencemaran udara asap rokok, pemerintah mempunyai struktur birokrasi khusus KTR.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai macam upaya penegakan peraturan berupa upaya represif bertujuan untuk penindakan terhadap pelanggaran norma, agar menimbulkan efek jera buat para pelakunya dan upaya preventif bertujuan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai pelanggaran peraturan tersebut, yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Dalam Upaya preventif yang dilakukan berupa pencegahan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok dengan kegiatan berupa sosialisasi, pembinaan dan pemberian pedoman, serta monitoring dan evaluasi.

Jadi, dapat diketahui bahwasanya penerapan dari sanksi administratif oleh Satpol PP pada kawasan Malioboro Kota Yogyakarta selama ini, hanya berupa pelaksanaan teguran lisan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat selalu mematuhi rokoknya ketika ditegur, sehingga perokok tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 5 Perwali Yogyakarta No. 22 Tahun 2017 mengenai teguran lisan yang tidak diindahkan. Namun hal yang disayangkan, walaupun Satpol PP telah melakukan teguran lisan, masih terdapat banyak masyarakat yang melanggar kegiatan merokok tersebut secara bergantian.

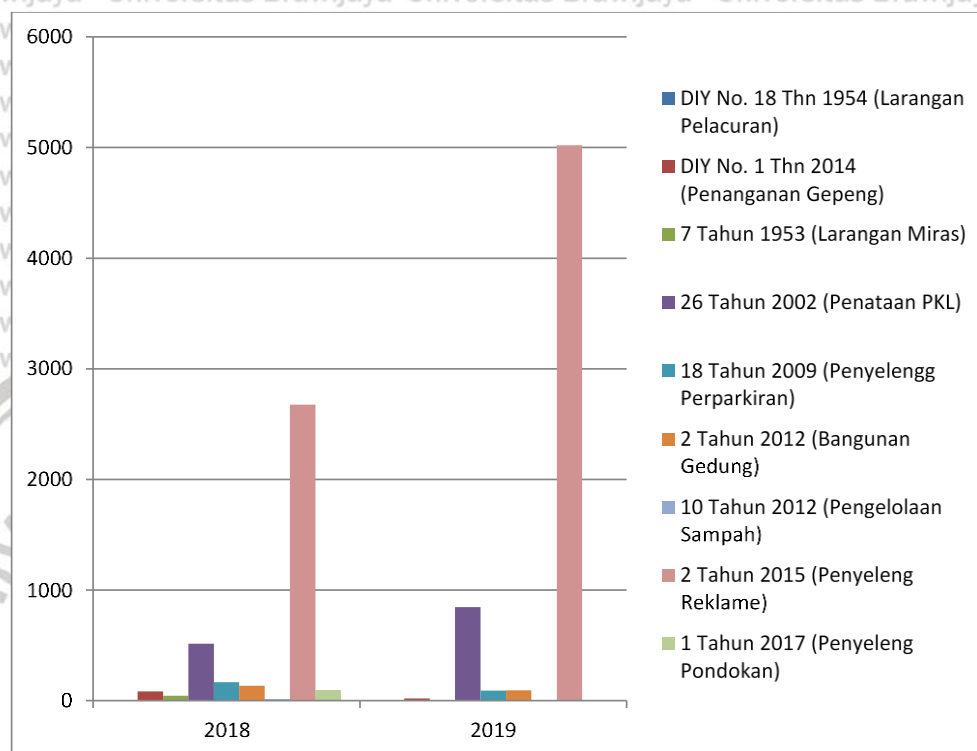
Maka perlu dilakukan upaya pengkajian dan pelaksanaan lebih dalam tujuan dan efisien dalam melakukan tindakan yang menimbulkan efek jera.

Berikut Grafik Pelanggaran Yang Diajukan Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2018 Dan 2019 :



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta.

Bentuk Grafik Hasil Penegakan Perda Secara Represif Non Yustisi Tahun 2018 Dan 2019 :



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta.

E. Hambatan dan solusi dalam Penegakan Sanksi Administratif Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kawasan Malioboro)

Kesehatan merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh negara untuk setiap warganya. Salah satu perilaku masyarakat Indonesia yang berdampak negatif bagi kesehatan individu dan lingkungan adalah merokok. Merokok selain berbahaya bagi diri sendiri juga membahayakan kesehatan orang lain yang memiliki hak untuk menghirup udara yang bersih dan terhindar dari

segala bahan cemaran yang dikeluarkan asap dari perokok.⁶⁵ Kebiasaan merokok sudah meluas di seluruh Indonesia, termasuk Kota Yogyakarta. Pada akhirnya mendekati kelompok masyarakat di Kota Yogyakarta, termasuk kalangan anak dan remaja memiliki kebiasaan merokok. Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok di Kota Yogyakarta perlu mendapat perhatian yang serius. Seperti yang kita ketahui, rokok merupakan salah satu yang membuat lingkungan sekitar kita menjadi tidak sehat, karena asap yang dihasilkannya mengandung banyak zat berbahaya yang dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan serta mengganggu kesehatan penikmatnya maupun orang disekitarnya. Sebagian besar orang bisa meninggal dikarenakan mengonsumsi rokok dengan berlebih. Awalnya memang tidak terasa sakit, tetapi semakin lama seseorang mengonsumsi rokok, maka akan banyak timbul berbagai penyakit dalam tubuhnya.⁶⁶ Sehingga penerapan dari kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada wilayah Yogyakarta memang perlu untuk dilakukan. Walaupun pada tahun 2017 Kota Yogyakarta telah memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa lokasi yang sudah ditetapkan aturan kawasan tanpa rokok terhadap masyarakat namun belum terlaksana dengan baik karena kurangnya pengetahuan terkait peraturan daerah tersebut dan kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri untuk menjaga kesehatan tubuh dalam mengurangi penggunaan rokok. Aturan tersebut sangat mudah dilanggar tanpa ada konsekuensi yang tegas dari penegak Kawasan Tanpa Rokok.

Walaupun telah diatur mengenai sanksi administratif, namun dalam Peraturan Daerah tersebut tidak diatur secara jelas mengenai lembaga dan proses penegakan hukum terkait pelanggaran di lapangan, disisi lain dengan denda yang masih terbilang rendah tersebut dianggap tidak akan memberikan efek jera pada pelaku dan hanya akan membuka peluang bagi praktek-praktek

⁶⁵ Andi Mariani, **Pemberlakuan Larangan Merokok di Tempat Umum dan Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal**, *Skripsi*: Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang, 2009. hlm. 1.

⁶⁶ Ade Resty Ambar Wati, **Penerapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 4, No. 2, Tahun 2017. hlm. 1.

Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) bagi pejabat yang berwenang. Dalam hal ini, masih terdapat kekaburan norma (vague van normen) yaitu keadaan dimana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas.

Membentuk tim khusus KTR dan menunjuk aparat-aparat tertentu yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan perokok pada Kawasan Tanpa Rokok. Keikutsertaan Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah. Tugas pokok dan fungsi Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah maka Satpol PP mempunyai kontribusi yang besar dalam hal pengawasan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan SKPD lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan lapangan.

Kenyataan di lapangan bahwa masih banyaknya ditemukan banyak pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok, berkaitan dengan tim penegak dan pengaturan kawasan tanpa rokok sangat erat dan harus seimbang. Jika pelanggaran masih banyak ditemukan dilapangan maka ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Sesuai hukum sudah jelas namun penegakan baik secara pembinaan dan pengawasan masih terkendala maka faktor penegak hukum merupakan salah satu penyebab masih banyaknya pelanggaran mengingat karakter dari petugas penegak hukum dalam melakukan tugasnya sangat penting, kalau dari segi peraturannya sudah baik, namun dari segi kualitas penegaknya masih kurang baik maka akan ada masalah yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam peraturan tersebut.

Pada dasarnya yang dilakukan penegak hukum KTR dirasa sudah cukup baik karena penentuan penerapan dimulai dengan tahap pemasangan tanda yang menyatakan dilarang merokok sudah dominan diaplikasikan oleh pimpinan badan setiap area-area yang dilarang untuk merokok termasuk di tempat kerja seperti di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Tetapi dalam penerapannya masih belum sesuai yang diharapkan, strategi ini bergantung dengan bagaimana konsep pembinaan pengawasan oleh Tim Khusus Kawasan Tanpa Rokok terhadap pimpinan badan/usaha kawasan tanpa rokok untuk memberikan tanda di kawasan tanpa rokok agar dapat memastikan jika ide-

ide ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Adapun masalah internal dan eksternal yang terjadi, yaitu:

1. Proses pembinaan dan pengawasan sebagai media penegakan hukum kawasan tanpa rokok kurang dalam harapan yang diinginkan. Kekurangan dalam strategi ini adalah bagi kawasan besar yang tergolong sebagai kawasan tanpa rokok seperti tempat-tempat umum seperti kawasan malioboro yang menjadi pusat Kota Yogyakarta. Tempat seperti ini akan sulit dilakukan pengawasan jika hanya melibatkan pimpinan badan untuk mengawasi karena kawasan malioboro merupakan kawasan yang luas dan pasti terdapat banyak perokok didalamnya.
2. Masih banyak pedagang rokok disekitar kawasan tersebut. Seharusnya untuk tempat-tempat seperti kawasan malioboro, pemerintah dapat memberikan tugas kepada Satpol PP ke titik tertentu dalam melakukan pengawasan kawasan tanpa rokok agar pengawasan dapat dilakukan secara merata diseluruh area-area kawasan malioboro tersebut.

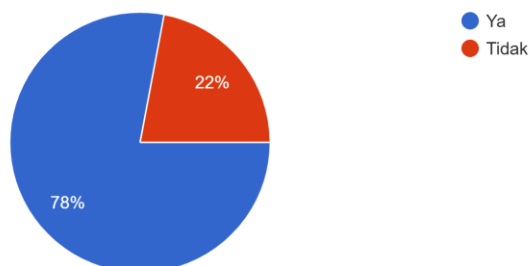
Selain itu, dapat diketahui juga bahwa hambatan yang dialami oleh penegak hukum dalam melaksanakan sanksi administratif dan penegakan larangan merokok antara lain:

1. Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta terlalu besar, sedangkan jumlah personil penegak hukum Satpol PP terbilang minim.
2. Disaat penegak hukum melakukan tindakan teguran lisan, masyarakat mengindahkan teguran tersebut dan mematikan rokok miliknya. Namun karena jumlah pelanggar sangat banyak dan personil terbilang minim, maka teguran lisan untuk *person to person* sangat sulit untuk dilakukan dan memakan waktu yang kurang berjalan dengan baik dengan yang diharapkan.
3. Sementara, sanksi administratif berupa denda tidak dapat dilaksanakan secara langsung, karena untuk melakukan sanksi tersebut para pelanggar wajib memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang ditetapkan pada Pasal 5 Perwali Yogyakarta No. 22 Tahun 2017. Sedangkan para pelanggar selalu mengindahkan teguran lisan disaat Satpol PP melakukan teguran tersebut. Dari hal tersebut, dapat diketahui juga bahwa tindakan teguran

tidak dapat berlaku baik sesuai yang diharapkan dalam meminimalisir jumlah masyarakat yang melanggar di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai sanksi yang diharapkan untuk diberlakukan.

Apakah anda setuju jika diadakan sanksi denda secara langsung?

59 jawaban



Pada kenyataannya masih banyak para pengunjung di Kawasan Malioboro yang mengharapkan penegakan hukum ini berjalan secara langsung dan lancar tanpa hambatan.

Sehingga dari hal tersebut dapat diketahui bahwasanya penerapan dari penegakan hukum sanksi administratif tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena masyarakat selalu mengindahkan teguran lisan dari penegak hukum Satpol PP, namun jumlah pelanggar tidak dapat diatasi oleh penegeka hukum Satpol PP. Maka dari hambatan tersebut, perlu dilakukan pengkajian lebih intensif dalam meminimalisir jumlah pelanggar di waktu yang akan datang. Namun juga perlu diketahui, bahwa implementasi dari Kawasan Tanpa Rokok juga mesti didukung dengan kepatuhan dan kepedulian masyarakat mengenai kebijakan tersebut, sehingga Kebijakan pemerintah tentang area bebas rokok nantinya akan mampu menyelamatkan nasib perokok pasif melihat banyaknya jumlah perokok aktif yang ada, khususnya di daerah Malioboro, Kota Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kesimpulan dari Penegakan Hukum Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Pasal 18 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kawasan Malioboro)

- a. Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta merupakan tempat umum atau kawasan yang melarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan/mempromosikan produk tembakau.

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta melakukan beberapa cara dalam menerapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu sosialisasi, pembinaan, dan penerapan peraturan. Segala cara dilakukan untuk melaksanakan peraturan tersebut agar berjalan dengan sebaik mungkin sesuai dengan yang diharapkan pemerintah Kota Yogyakarta, dan tidak hanya pejabat yang berwenang tetapi masyarakat juga harus sadar dan paham tentang maksud dan tujuan peraturan tersebut dibuat.

- b. Kurangnya penegakan hukum dan dibutuhkan tim khusus untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi dalam penegakan sanksi administratif kawasan tanpa rokok. Pengawasan kawasan tanpa rokok juga diawasi dari perwakilan masyarakat, perwakilan organisasi masyarakat, perwakilan akademisi, perwakilan Majelis Ulama Indonesia, perwakilan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Dukungan dari para pegawai yang berada di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Satpol PP Kota Yogyakarta ditunjukkan dengan mematuhi aturan yang berlaku, namun, masih ada pelaku yang belum mematuhi aturan tersebut.

2. Hambatan dalam Penegakan Hukum Sanksi Administratif Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kawasan Malioboro) dan bagaimana cara mengatasinya

- a. Hambatan dalam Penegakan Hukum Sanksi Administratif Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kawasan Malioboro) terkait pelanggaran di lapangan, disisi lain dengan denda yang masih terbilang rendah tersebut dianggap

tidak akan memberikan efek jera pada pelaku dan hanya akan membuka peluang bagi praktek-praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) bagi pejabat yang berwenang

- b. Solusi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yaitu mempertegas sanksi bagi para pelanggar, menyediakan tempat khusus merokok dan memasang tanda larangan merokok di beberapa tempat Kota Yogyakarta. Penegakan sanksi administratif Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta masih ditemukan kendala dalam penerapannya yaitu kurangnya sosialisasi, kurangnya kepatuhan masyarakat, sarana yang belum memadai dan sanksi yang kurang tegas dari aparat penegak hukum.

Diketahui bahwa hasil yang telah dicapai dari Penegakan Sanksi Administratif Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dapat dirasakan. Dalam tahapannya cukup kooperatif dan mendukung tahapan pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.

B. Saran

Dalam penelitian ini peneliti memberikan saran mengenai Penegakan Sanksi Administratif Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kawasan Malioboro Yogyakarta) yaitu:

1. Kepada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Satpol PP Kota Yogyakarta memperbanyak melakukan kegiatan sosialisasi agar masyarakat lebih mengetahui adanya Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan paham dengan ketentuan dan aturan yang ada di dalamnya.
2. Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta segera membuat sanksi untuk denda administrasi agar lebih membuat efek jera terhadap pelaku pelanggaran untuk mendukung adanya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini, sehingga adanya perubahan terhadap kawasan tanpa rokok di Kota Yogyakarta.
3. Kepada masyarakat harus bisa lebih sadar untuk mematuhi dan menaati perda ini, dan memahami isi dari perda tersebut agar tidak ada lagi

pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam hal merokok di kawasan
tanpa rokok sebagaimana yang telah diatur dalam perda ini.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang P., **Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Dellyana, Shanti, **Konsep Penegakan Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Depdikbud, RI, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Jakarta : Balai Pustaka, 1989,

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, **Panduan Praktik**

Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2005.

Efendi A'an, Freddy Poernomo. **Hukum Administrasi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Imron Rosyadi, **Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia**, Jurnal Media Hukum, Vol. 3 No. 2, 2007.

Irawan Soejito, **Teknik Membuat Peraturan Daerah**, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Gerry Putra Ginting, **Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan di Kabupaten Sleman**, Universitas Atma Jaya *E-Journal*, Yogyakarta, 2015.

Jaya M, **Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok**, Rizma, Jakarta, 2009.

Laurence A Manullang. **Geographis Indonesia**. Universitas Timbul Nusantara, Jakarta, 2020.

M Yunus, **Kitab Rokok**, Kutub, Yogyakarta, 2009.

Mira Hasti Hasmira, **Bahan Ajar Sosiologi Hukum**, Universitas Negeri Padang, Padang, 2015.

R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Samsul Ramli dan Fahrurrazi, **Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa**, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014.

Satipto Rahardjo. **Masalah Penegakan Hukum**, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1981.

Suparto Wijoyo, **Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara) Edisi Kedua**, Airlangga University Press, Surabaya. 2005.

Soetandyo Wignjosebroto, **Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya**, ELSAM dan HUMA, Jakarta. 2002

Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta. 1986,

Sunggono B., **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Teddie Sukmana, A.Md, **Mengenai Rokok dan Bahayanya**, *Be Champion*, Depok, 2011.

Wendyartaka, Anung. **Pendapat Masyarakat Kota Yogya tentang Pariwisata Daerah**. Kompas. Jakarta. 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

SKRIPSI DAN JURNAL

A. Zarkasi, **Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 4, April 2010.

Ade Resty Ambar Wati, **Penerapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 4, No. 2, Tahun 2017.

Andi Mariani, **Pemberlakuan Larangan Merokok di Tempat Umum dan Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal**, *Skripsi*: Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2009.

Alamsyah, **Faktor Yang Mempengaruhi Kebiasaan Merokok dan Hubungannya dengan Status Penyakit Periodontal Remaja di Kota Medan**, *Thesis*, Universitas Sumatera Utara, Sumatera, 2009.

Fachrizal David, **Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Inco Soroako**. *Skripsi*: Universitas Hasanuddin. Makassar. 2018.

Meysi Ariska, **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok**, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 5, No. 1, 2017.

Muhammad Jufri, **Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Efektivitas Area Kawasan Tanpa Rokok di Pondok Pesantren Nurul Falah Kawatuna Kota Palu**, Jurnal Kesehatan Tadulako, Vol. 1 No. 2, Juli 2015.

Nurjanah, **Gangguan Fungsi Paru dan Kadar Cotinine pada Urin Karyawan yang Terpapar Asap Rokok Orang Lain**, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 10 No. 1, Juli 2014.

Noor M., **Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**, Jurnal *RechtVinding*. Vol.1, No.1. Tahun 2012.

Santosa, **Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Peningkatan Kesehatan Masyarakat**, Jurnal ISSN, Vol.10 No.2, April 2013.

Setiadi, W., **Sanksi Administrasi Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan**. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6, No. 4, 2018.

SITUS INTERNET

Admin. **Website Resmi Pemerintahan Kota Yogyakarta**, 2021. Diambil dari <https://www.jogjakota.go.id/>, Diakses pada tanggal 27 Mei 2021.

Admin. **Situs Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta**, 2021. Diambil dari <https://kesehatan.jogjakota.go.id/beranda>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2021.

Admin. **Sejarah**, 2021. Diambil dari <https://satpolpp.jogjaprovo.go.id/v2/profil-satpol-pp-diy/sejarah/>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2021.

Admin. **Visi Misi**, 2021. Diambil dari <https://polpp.jogjakota.go.id/page/index/visi-misi>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2021.

Admin. **Zat Adiktif**, 2017. Diambil dari https://id.wikipedia.org/wiki/Zat_adiktif, Diakses pada tanggal 27 Mei 2021.

Azka Ramadhan. **Malioboro Resmi Jadi Kawasan Tanpa Rokok, Warga hingga Wisatawan Dilarang Merokok Sembarangan**, 2020. Diambil dari <https://jogja.tribunnews.com/2020/11/12/malioboro-resmi-jadi-kawasan-tanpa-rokok-warga-hingga-wisatawan-dilarang-merokok-sembarangan?page=3>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2021.

Kevin Adrian. **Segudang Bahaya Merokok bagi Kesehatan Tubuh**, 2021. Diambil dari <https://www.alodokter.com/segudang-bahaya-merokok-terhadap-tubuh>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2021.

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN**

ꦑꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦏꦂꦠ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax. (0274) 515869
EMAIL: keehatan@logjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@logjakota.go.id
WEBSITE: www.logjakota.go.id

Nomor : 421/ 3 56
Sifat :
Lamp :
Hal : Ijin Survei

Yogyakarta, 20-05-2021
Kepada Yth :
Kepala
Di-
YOGYAKARTA

Berdasarkan surat dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Nomor : 4416/UN10.F01.01/PP/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal ijin survei dan setelah dilakukan telaahan maka Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memberikan ijin survei kepada:

Nama : Safira Riansyah
NIM : 175010107111092
No HP : 081383071108
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Judul Proposal : Penegakan Sanksi Administratif Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
Lokasi : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Metode : Pengambilan data lewat daring/online

Adapun waktunya mulai 20 Mei 2021 s.d 20 Juni 2021
Dengan ketentuan :

1. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Ijin survei tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
3. Menerapkan protokol kesehatan

Kemudian diharap para pejabat setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Demikian ijin survei dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala
Sekretaris
Ani Iryawati S.IP
NIP. 197402101997031004

Tembusan :
Tim PKL Dinkes Kota Yogyakarta

SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

2. Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
ꦱꦠꦸꦤ꧀ꦥꦺꦴꦏꦸꦤ꧀ꦥꦩꦺꦴꦁꦥꦫꦗ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 556917, 515865, 562682
EMAIL: polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : /

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	: Drs. AGUS WINARTO, M.IP
NIP	: 19730318 199203 1 004
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
	: Yogyakarta
Alamat	: Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta

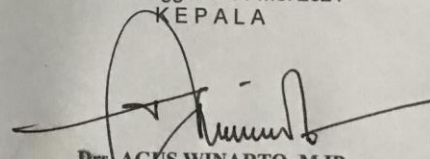
Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a	: SAFIRA RIYANSYAH
NIM	: 175010107111092
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Hukum Universitas Brawijaya
Alamat	: Universitas Brawijaya

Berdasarkan Surat dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor : 3767/UN10 tanggal 23 April 2021, benar-benar telah melakukan Penelitian Penegakan Sanksi Administrasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang KTR di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : YOGYAKARTA
Pada tanggal : 31 Mei 2021
KE P A L A


Drs. AGUS WINARTO, M.IP
NIP. 19730318 199203 1 004

SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

3. Draft Wawancara

A. Daftar pertanyaan wawancara peneliti kepada para pihak. Yaitu:

1. Seberapa banyak pelanggaran yang terjadi setelah disahkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?
2. Bagaimana cara mengukur tingkat pelanggaran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta?
4. Apa landasan pembuatan Pasal 25 ayat 2 Sanksi Administrasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?
5. Bagaimana alokasi biaya Sanksi Administrasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta?
6. Bagaimana kebijakan yang dilakukan terhadap Sanksi Administrasi peraturan daerah tersebut?
7. Bagaimana tolok ukur dalam evaluasi pelaksanaan Sanksi Administrasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta?

B. Draft pertanyaan wawancara peneliti kepada pedagang rokok dan wisatawan, yaitu:

1. Apakah anda mengetahui adanya Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok?
2. Apakah menurut anda peraturan tersebut sudah berjalan dengan baik?
3. Bagaimana tanggapan anda terhadap peraturan tersebut?

4. Jadwal Kegiatan Prasurvey

LOKASI	TANGGAL	JAM
Jalan Malioboro	22 Oktober 2020	13.00-14.00
Jalan Malioboro	23 Oktober 2020	16.00-17.00
Dinas Kesehatan Yogyakarta (Surat Masuk Pra Survey)	10 Mei 2021	10.00
Satpol PP Yogyakarta (Surat Masuk Pra Survey)	10 Mei 2021	10.00
Dinas Kesehatan Yogyakarta (Pelaksanaan Pra Survey)	10-11 Mei 2021	10.00
Satpol PP Yogyakarta (Pelaksanaan Pra Survey)	10-11 Mei 2021	10.00
Dinas Kesehatan Yogyakarta (Pelaksanaan Pra Survey)	28 Mei 2021	13.00
Satpol PP Yogyakarta (Pelaksanaan Pra Survey)	28 Mei 2021	10.00

5. Draft Pertanyaan Google Form

1. Nama
2. Usia
3. Jenis Kelamin
4. Domisili
5. Apakah anda pernah mengunjungi Jl. Malioboro?
6. Apakah anda pernah menemukan puntung rokok di Jl. Malioboro?
7. Apakah anda pernah menjumpai pengunjung merokok di Jl. Malioboro?
8. Apakah anda mengetahui tentang kawasan tanpa rokok?
9. Apakah anda mengetahui di Jl. Malioboro ada kawasan tanpa rokok?
10. Apakah anda mengetahui adanya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok?
11. Apakah anda mengetahui sanksi dari peraturan tersebut?
12. Apakah menurut anda sanksi tersebut sudah sesuai?
13. Apakah anda setuju jika diadakan sanksi denda secara langsung?

14. Apakah anda setuju jika ada tim khusus yang mengawasi kawasan tanpa rokok?

15. Berikan kritik dan saran anda tentang peraturan daerah kawasan tanpa rokok!

